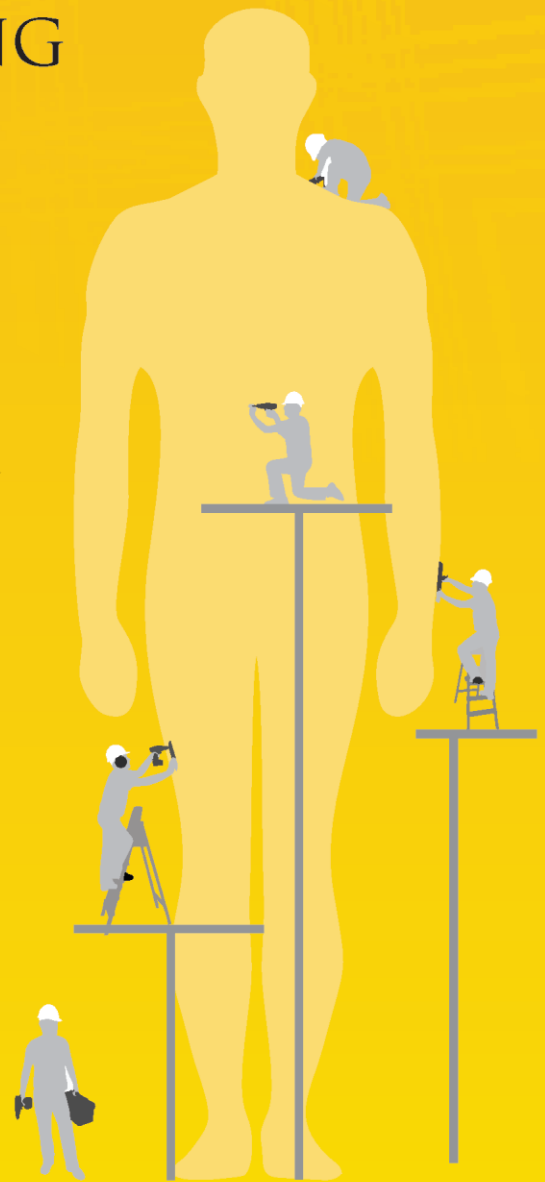




ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN MAGELANG

2014



<https://magelangkab.bps.go.id>

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN MAGELANG

2014

<https://magelangkab.bps.go.id>



Judul Buku :

**ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN MAGELANG 2014**

Nomor Publikasi :

Ukuran Buku : Kwarto (21 x 28 cm)

Jumlah Halaman : xi + 65 hal

Naskah :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Gambar Kulit :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Diterbitkan Oleh :

BAPPEDA Kabupaten Magelang

Boleh dikutip dengan menyebut nama sumbernya

KATA PENGANTAR

Syukur kehadiran Allah SWT, penyusunan buku Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Magelang Tahun 2014 dapat diterbitkan. Publikasi ini disusun guna memenuhi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Magelang dan diharapkan dapat menghasilkan bahan rekomendasi bagi implikasi kebijakan pembangunan yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Magelang secara luas.

Guna melihat sampai seberapa jauh tingkat keberhasilan pembangunan, diperlukan alat ukur dan indikator yang dapat menggambarkan kondisi tersebut. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang dapat mewakili keterbandingan hasil pembangunan manusia antar waktu dan antar daerah. Dengan konsep pembangunan manusia sebagai ukuran pencapaian hasil pembangunan menempatkan manusia pada posisi yang sebenarnya yaitu manusia sebagai penerima akhir dari hasil-hasil pembangunan.

Kegiatan penyusunan publikasi ini merupakan kerjasama antara BAPPEDA Kabupaten Magelang dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang. Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini.

Kota Mungkid, November 2015

Plt. **KEPALA BAPPEDA**
KABUPATEN MAGELANG
Staf Ahli Bupati Bidang Ekbang



Drs. SUGIYONO, M. Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19640102 198405 1 004

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : Sri Handayani, SE, MM

Editor : Dewi Prastiwi, S.Si

Penyusun : Clara Sherly Rifera Putri, S.ST
Munfiati Lestari, S.Si

<https://magelangkab.bps.go.id>



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	iii
Tim Penyusun	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Grafik.....	x
Abstraksi.....	xi
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	3
1.3. Ruang Lingkup.....	3
1.4. Sumber Data.....	4
Bab II Metodologi	5
2.1. Perubahan Metodologi.....	5
2.2. Tahapan Perhitungan IPM	7
2.3. Kategori Peringkat Pembangunan Manusia	9
Bab III Gambaran Umum.....	10
3.1. Keadaan Geografis.....	10
3.2. Kependudukan.....	10
3.2.1. Laju Pertumbuhan Penduduk.....	11
3.2.2. Komposisi Penduduk Kabupaten Magelang.....	13
3.2.3. Kepadatan Penduduk.....	17
3.3. Kondisi Ekonomi.....	18
3.4. Laju Inflasi.....	22
Bab IV Kondisi Pembangunan Manusia.....	25
4.1. Pembangunan Manusia.....	25



4.2.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	27
4.3.	Nilai Dan Posisi IPM.....	28
4.4.	Komponen-Komponen IPM	29
4.4.1.	Angka Harapan Hidup (e0).....	31
4.4.2.	Pendidikan	33
4.4.2.1.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	33
4.4.2.2.	Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	34
4.4.3.	Kemampuan Daya Beli (PPP)	36
Bab V Indikator Pendukung Indeks Pembangunan Manusia.....		39
5.1.	Ketenagakerjaan.....	39
5.1.1.	Aktivitas Penduduk Usia Kerja	40
5.1.2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	41
5.1.3.	Penduduk Bekerja	42
5.1.3.1.	Penduduk Yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan	42
5.1.3.2.	Penduduk Yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama	44
5.2.	Pendidikan.....	45
5.2.1.	Partisipasi Sekolah	46
5.2.2.	Jenjang Pendidikan.....	48
5.2.3.	Sarana Sekolah Dan Tenaga Pengajar.....	50
5.3.	Kesehatan.....	52
5.3.1.	Angka Kesakitan.....	52
5.3.2.	Penolong Persalinan.....	53
5.3.3.	Pemberian ASI.....	55
5.3.4.	Fertilitas Dan Partisipasi Keluarga Berencana	56
5.4.	Perumahan	60
Bab VI Kesimpulan Dan Saran.....		65



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1	Nilai Maksimum dan Nilai Minimum Indikator Komponen IPM . 8
Tabel 3.1	Ratio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Magelang Menurut Kelompok Umur, 2010 dan 2014..... 15
Tabel 3.2	Dependency Ratio Penduduk Kabupaten Magelang, 2010 dan 2014 16
Tabel 3.3	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang, 2014 18
Tabel 3.4	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Serta Perkembangannya di Kabupaten Magelang, 2010 – 2014 19
Tabel 3.5	PDRB Perkapita Kabupaten Magelang, 2010 – 2014 20
Tabel 3.6	Pertumbuhan Sektor Ekonomi di Kabupaten Magelang, 2010 - 2014 (Persen) 20
Tabel 3.7	Struktur Ekonomi Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku, 2010 - 2014 (Persen) 21
Tabel 3.8	Laju Inflasi Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dan Nasional, 2010 -2014 23
Tabel 4.1	Nilai dan Peringkat IPM Kabupaten/Kota se-Karesidenan Kedu, 2014..... 29
Tabel 4.2	Nilai Komponen-Komponen IPM Kabupaten/Kota se-Karesidenan Kedu, 2014..... 31
Tabel 4.3	Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota se-Karesidenan Kedu, 2010 - 2014 32
Tabel 4.4	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Karesidenan Kedu, 2010 - 2014 34



Tabel 4.5	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Karesidenan Kedu, 2010 - 2014	35
Tabel 4.6	Rata-rata Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten/Kota se-Karesidenan Kedu, 2010 – 2014.....	38
Tabel 5.1	Persentase Angkatan Kerja dan Kegiatan yang Dilakukan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Magelang, 2011 – 2014.....	41
Tabel 5.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Magelang, 2010 - 2014	41
Tabel 5.3	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Magelang, 2010 - 2014	43
Tabel 5.4	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Magelang, 2010 - 2014	44
Tabel 5.5	Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Magelang, 2010 – 2014.....	46
Tabel 5.6	Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi Kabupaten Magelang, 2010 - 2014	47
Tabel 5.7	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Magelang, 2010 - 2014	49
Tabel 5.8	Ratio Murid Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan yang Sedang Diduduki di Kabupaten Magelang Tahun Ajaran 2014/2015.....	51
Tabel 5.9	Ratio Murid Guru Menurut Jenjang Pendidikan yang Sedang Diduduki di Kabupaten Magelang Tahun Ajaran 2014/2015.....	52
Tabel 5.10	Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan yang lalu Menurut Jumlah Hari Sakit Di Kabupaten Magelang, 2010 - 2014	53
Tabel 5.11	Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Pertama dan Terakhir Di Kabupaten Magelang, 2010 - 2014	55



Tabel 5.12	Persentase Pemberian ASI pada Balita Usia 0-4 tahun yang Pernah Disusui Dan Lamanya Disusui (bulan) di Kabupaten Magelang, 2010 - 2014	56
Tabel 5.13	Indikator Fertilitas di Kabupaten Magelang, 2010 – 2014.....	57
Tabel 5.14	Indikator Keluarga Berencana (KB) Wanita Berumur 15-49 Tahun, Pernah Kawin dan Pernah/Tidaknya Menggunakan Alat/Cara KB di Kabupaten Magelang, 2010 - 2014	59
Tabel 5.15	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Magelang, 2010 - 2014	62
Tabel 5.16	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Magelang, 2010 - 2014	62
Tabel 5.17	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Magelang, 2010 - 2014	63



DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 3.1 Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Kabupaten Magelang, 2010 - 2014	12
Grafik 3.2 Piramida Penduduk, 2010	13
Grafik 3.3 Piramida Penduduk, 2014.....	13
Grafik 3.4 Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Magelang, 2010-2014.....	21
Grafik 3.5 Struktur Ekonomi Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku, 2014	22



Abstraksi

Guna mengukur tingkat keberhasilan pembangunan, banyak indikator yang dapat dijadikan sebagai alat ukur. Salah satu diantaranya yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mengukur tingkat pencapaian keseluruhan dari suatu wilayah negara/propinsi/kabupaten/kota dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup, pengetahuan dan suatu standar hidup yang layak. Ketiganya diukur dengan angka harapan hidup, pencapaian pendidikan dan pendapatan perkapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli.

Publikasi “Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Magelang Tahun 2014” ini bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2014. Disamping itu, publikasi ini menyajikan secara deskriptif data IPM Kabupaten Magelang dengan metode baru dan menyajikan indikator input maupun dampak dari hasil pembangunan manusia di Kabupaten Magelang.

Nilai IPM dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Magelang tahun 2014 menempati peringkat ketiga se-Karesidenan Kedu dengan masing-masing pencapaiannya sebesar 66,35 persen dan 7,02 tahun. Sedangkan Angka Harapan Hidup dan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Magelang tahun 2014 masing-masing menempati peringkat keempat se-Karesidenan Kedu dengan pencapaian sebesar 73,25 persen dan 12 tahun.

Dengan disajikannya data pembangunan manusia, diharapkan semakin memantapkan kebijakan pembangunan yang berwawasan pembangunan manusia yang seiring dengan semakin kuatnya kapasitas kemampuan penentu pengambil kebijakan dalam mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di daerah. Data tersebut juga dapat dijadikan dasar untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan manusia yang sudah dilaksanakan.

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat telah memberi kewenangan yang besar kepada daerah. Dengan tipe desentralisasi yang bersifat devolusi, maka pemerintah daerah telah disertai kewenangan yang cukup kuat untuk mengambil keputusan, keuangan dan manajemen terhadap pemerintahan daerahnya sendiri. Pemerintah daerah juga diberi kesempatan untuk memilih pemimpinnya sendiri, meningkatkan pendapatan daerahnya dan membuat keputusan investasinya.

Dengan kewenangan pemerintah daerah yang begitu besar, maka masalah berikutnya yang akan muncul diantaranya adalah masalah pemerataan. Kabupaten/kota yang memiliki sumber daya fisik/alam dan sumber daya manusia yang lebih besar akan maju jauh lebih cepat dibandingkan dengan daerah lainnya.

Salah satu cara yang dapat menjamin bahwa dalam otonomi daerah, pembangunan berjalan merata untuk semua kepentingan rakyat Indonesia adalah dengan membuat kesepakatan sosial (*social compact*) yaitu suatu kesepakatan bahwa semua rakyat Indonesia berhak atas suatu standar pembangunan manusia. Rakyat Indonesia berhak untuk bisa membaca dan menulis, berhak untuk hidup sehat, berhak untuk mendapatkan penghasilan yang layak, berhak untuk mendapatkan rumah yang memadai dan berhak untuk hidup dengan damai dan aman.

Hak-hak tersebut harus dirasakan oleh semua rakyat di berbagai daerah. Ini bukan sebagai bentuk penyeragaman. Indonesia akan tetap sebagai negara yang kaya akan keragaman, tetapi pada saat yang sama juga harus memiliki kerangka atas hak-hak dan standar yang disepakati bersama. Dengan adanya kesepakatan tentang pembangunan manusia, keragaman budaya daerah dan etnis tidak akan menjadi

elemen yang dapat memecah belah, bahkan akan menjadi komponen yang dapat memperkuat dan menyatukan bangsa. Bentuk-bentuk kesepakatan yang dikutip dalam “Laporan Pembangunan Manusia Indonesia” antara lain :

1. Pernyataan misi (*mission statement*) yaitu menekankan pentingnya pembangunan manusia dan memperjelas perlunya kemitraan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dengan pernyataan misi ini, maka akan ada suatu ketetapan pentingnya pembangunan manusia baik sebagai proses maupun sebagai akhir. Kemitraan pemerintah pusat dan daerah diperlukan antara lain untuk memecahkan persoalan otonomi daerah yang dapat berupa pendistribusian sumber daya dan pembagian keuangan yang harus dibagi antara pusat dan daerah.

2. Standar pembangunan manusia (*human development standards*) yaitu menetapkan tingkatan yang harus dicapai oleh semua daerah.

Standar minimal yang dapat dibuat adalah untuk menarik daerah-daerah yang tertinggal untuk mencapai rata-rata nasional. Standar universalnya dapat mengikuti standar internasional.

3. Diskusi publik (*public deliberations*) yaitu memperkuat norma dan tata nilai demokrasi, tukar menukar ide dan informasi antar daerah.

Hasil kesepakatan tersebut adalah dapat memperkuat persatuan nasional, konsolidasi bagi terciptanya demokrasi yang lebih baik dan dapat memacu para pembuat kebijakan dan pejabat daerah untuk memperbaharui komitmen mereka terhadap pembangunan manusia.

Mengingat pentingnya Analisis Situasi Pembangunan Manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan informasi terkait capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang dalam hal pembangunan manusia yang dikemas dalam publikasi dengan judul “Analisis Situasi Pembangunan Manusia

Kabupaten Magelang Tahun 2014” dengan indikator berupa Indeks Pembangunan Manusia.

1.2. Tujuan

Adapun beberapa tujuan disusunnya buku “Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Magelang Tahun 2014” diantaranya adalah:

1. Menyajikan informasi mengenai capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2014
2. Menyajikan data dan ulasan deskriptif IPM Kabupaten Magelang Tahun 2014
3. Menyajikan indikator input maupun dampak dari hasil pembangunan manusia di Kabupaten Magelang yang terangkum dalam Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM) Tahun 2014
4. Membandingkan percepatan pembangunan manusia Kabupaten Magelang dengan daerah tetangganya dengan menggunakan indikator IPM.

Dengan disajikannya data pembangunan manusia, diharapkan semakin memantapkan kebijakan pembangunan yang berwawasan pembangunan manusia yang seiring dengan semakin kuatnya kapasitas kemampuan penentu pengambil kebijakan dalam mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di daerah. Data tersebut juga dapat dijadikan dasar untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan manusia yang sudah dilaksanakan.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan “Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Magelang Tahun 2014” meliputi kondisi perekonomian, kependudukan, ketenagakerjaan, pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Magelang yang merupakan indikator pendukung dalam penghitungan IPM. Sedangkan indikator utama dalam

penghitungan IPM adalah Angka Harapan Hidup Ketika Lahir, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita.

1.4. Sumber Data

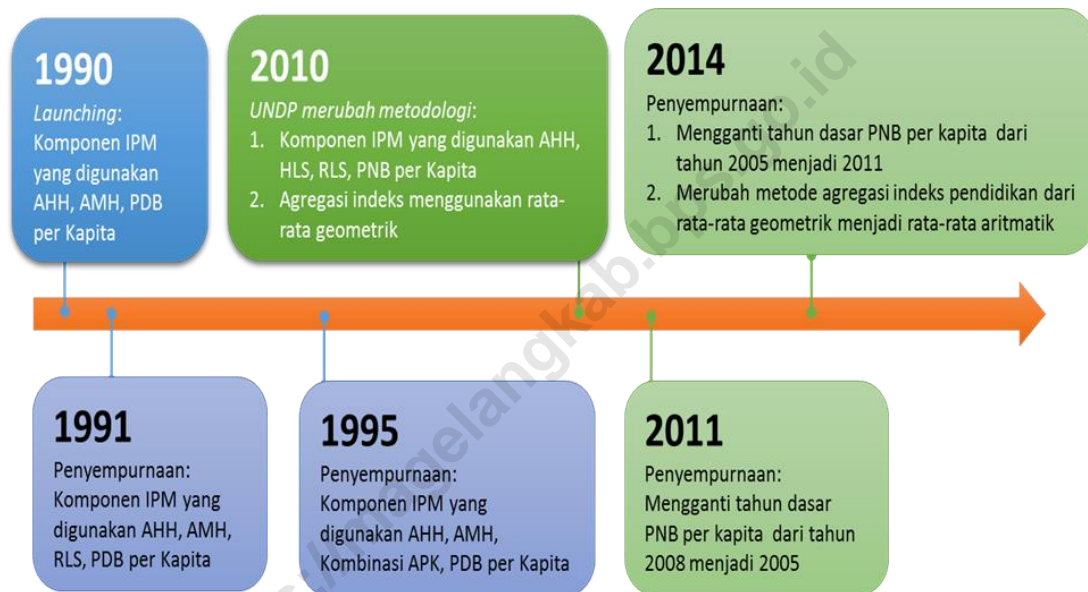
Data yang digunakan dalam analisa ini bersumber dari :

1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), sebagai dasar untuk memperoleh gambaran makro mengenai kependudukan, kesehatan, pendidikan, wanita dan KB, kondisi tempat tinggal dan keterangan sosial lainnya.
2. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), sebagai dasar untuk memperoleh gambaran makro ketenagakerjaan.
3. Data sekunder dari instansi terkait tentang kesehatan dan pendidikan.

Bab II Metodologi

2.1. Perubahan Metodologi

Pada tahun 2010, UNDP memperkenalkan IPM dengan metode baru. Tahun 2011 dan 2014 dilakukan penyempurnaan metodologi (IPM Metodologi Baru).



Alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM adalah:

- Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.
- PDB perkapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
- Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Oleh karena itu, ada indikator dan metode penghitungan yang berubah dalam penghitungan IPM metode baru, yaitu:

- a) Indikator angka melek huruf (AMH) pada metode lama diganti dengan angka harapan lama sekolah (HLS).
- b) Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.
- c) Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Variabel dalam Penghitungan IPM Metode Baru :

- a) Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)

AHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat, AHH dihitung dari hasil proyeksi SP2010.

- b) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas, dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP.

- c) Harapan Lama Sekolah (HLS)

HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren dari Direktorat Pendidikan Islam.



d) Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan setahun diperoleh dari susenas modul. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat dengan tahun dasar 2012=100. Penghitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas, 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Metode penghitungannya menggunakan Metode Rao.

Perhitungan Paritas Daya Beli (PPP) dilakukan sesuai rumus:

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

keterangan :

$p(i,k)$: Harga komoditas i di Jakarta Selatan

$P(i,j)$: Harga komoditas i di kab/kota j

m : jumlah komoditas

2.2. Tahapan Penghitungan IPM

Beberapa tahapan dalam penghitungan IPM dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Tahap pertama** penghitungan IPM adalah menghitung indeks masing-masing komponen IPM (Indeks Harapan Hidup = X_1 , Pengetahuan = X_2 dan Standar Hidup Layak = X_3)

$$\text{Indeks } (X_i) = (X_i - X_{\min}) / (X_{\max} - X_{\min})$$

keterangan :

- X_i : Indikator komponen pembangunan manusia ke-i, $i = 1, 2, 3$
 X_{\min} : Nilai minimum X_i
 X_{\max} : Nilai Maksimum X_i

Tabel 2.1. Nilai Maksimum dan Nilai Minimum Indikator Komponen IPM

Indikator	Nilai Maksimum	Nilai Minimum
(1)	(2)	(3)
Angka Harapan Hidup	85	20
Harapan Lama Sekolah (HLS)	18	0
Rata-rata Lama Sekolah	15	0
Konsumsi Perkapita yang Disesuaikan	26 572 352	107 721

Sumber : BPS, UNDP

- **Tahap kedua** perhitungan IPM adalah menghitung rata-rata geometrik dari masing-masing indeks X_i dengan rumus:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}}$$

keterangan :

- $X(1)$: Indeks Angka Harapan Hidup
 $X(2)$: $\frac{1}{2}$ (Indeks Harapan Lama Sekolah + Indeks Rata-rata Lama Sekolah)
 $X(3)$: Indeks Konsumsi perkapita yang disesuaikan

- **Tahap ketiga** adalah menghitung *pertumbuhan IPM*, yang digunakan untuk mengukur kecepatan perkembangan nilai IPM dalam satu tahun.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 10$$

Keterangan :

IPM_t : IPM pada tahun t

IPM_{t-1} : IPM pada tahun t-1

2.3. Kategori Peringkat Pembangunan Manusia

Konsep pembangunan manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,00–100,0 dengan kategori sebagai berikut:

- Sangat Tinggi : IPM lebih dari 80,0
- Tinggi : IPM antara 70,0 – 79,9
- Sedang : IPM antara 60,0 – 69,9
- Rendah : IPM kurang dari 60,0



Bab III Gambaran Umum

3.1. Keadaan Geografis

Kabupaten Magelang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah terletak antara 110°01'51" dan 110°26'58" Bujur Timur dan antara 7°19'33" dan 7°42'16" Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 360 meter dari permukaan laut. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, sebelah Timur Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali, sebelah Selatan Kabupaten Purworejo dan DI Yogyakarta, sebelah Barat Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo dan di Tengah terletak Kota Magelang.

Ibukota Kabupaten Magelang terletak di Kota Mungkid, dengan luas wilayah Kabupaten 108.573 Ha atau sekitar 3,34 persen dari luas provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, Kabupaten Magelang dibagi menjadi 21 kecamatan dan terdiri dari 372 desa/kelurahan. Bila ditinjau berdasarkan Luas Tanah Menurut Penggunaannya di wilayah Kabupaten Magelang sejak tahun 2010 hingga tahun 2015, komposisi antara Tanah Sawah dan Tanah Kering mengalami pergeseran. Pada tahun 2010, luas Tanah Sawah tercatat 37 220 Ha (34,28 persen) dan luas Tanah Kering tercatat 71 353 Ha (65,72 persen), sedangkan pada tahun 2014 luas Tanah Sawah 36 892 Ha (33,98 persen) dan luas Tanah Kering 71 681 Ha (66,02 persen). Salah satu penyebab adanya pergeseran ini yaitu terjadinya perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian menjadi pemukiman, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

3.2. Kependudukan

Demografi atau sering juga disebut statistik kependudukan merupakan gambaran tentang struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk meliputi jumlah, penyebaran dan komposisi penduduk. Struktur penduduk ini selalu berubah-

ubah dan perubahan tersebut disebabkan karena proses demografi yaitu kelahiran, kematian dan migrasi penduduk.

Perubahan struktur penduduk ini membutuhkan proses panjang, selama proses tersebut berlangsung, karakteristik penduduk mengalami berbagai perubahan baik dalam variabel demografi maupun sosial ekonomi dan budaya. Pemahaman mengenai karakteristik penduduk dan berbagai perubahan yang dialaminya menjadi sangat penting, mengingat peran penduduk sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Penduduk sebagai subyek berarti penduduk akan melaksanakan dan mengisi pembangunan, sedangkan sebagai obyek berarti penduduk akan menerima segala manfaat dan konsekuensi hasil-hasil pembangunan.

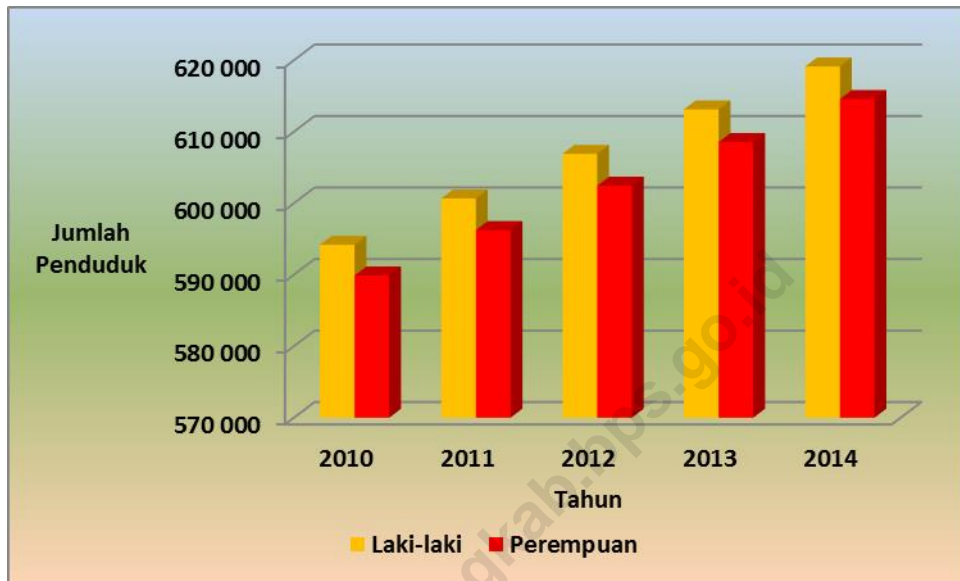
Hasil-hasil pembangunan masa lalu akan tercermin dalam karakteristik penduduk di masa sekarang dan selanjutnya pembangunan di masa mendatang merupakan cerminan dari karakteristik penduduk saat ini dan perkiraan perubahannya di masa mendatang. Perencanaan pembangunan yang didasarkan atas kondisi demografi penduduk, sangat diperlukan untuk lebih menjamin tercapainya tujuan pembangunan dan menekan efek negatif dari pembangunan itu sendiri.

3.2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk disuatu daerah dipengaruhi oleh besarnya kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Penduduk akan bertambah jumlahnya jika ada penduduk yang lahir dan yang datang, dan penduduk akan berkurang bila ada penduduk yang mati dan meninggalkan daerah tersebut.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010, jumlah penduduk Kabupaten Magelang terus mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Kabupaten Magelang berdasarkan hasil Sensus Penduduk secara berurutan masing-masing sebesar 820.310 jiwa, 935.191 jiwa, 1.016.635 jiwa, 1.105.722 jiwa dan 1.181.916 jiwa.

Grafik 3.1
Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Kabupaten Magelang, 2010 - 2014



Sumber data: BPS Kabupaten Magelang

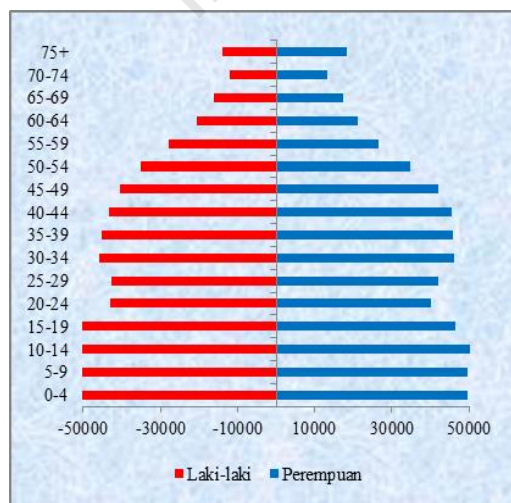
Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, terlihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Magelang terus mengalami peningkatan. Dari grafik 3.1 juga terlihat bahwa komposisi jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi dibanding penduduk perempuan. Pada tahun 2013, jumlah penduduk laki-laki sebesar 613.112 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 608.569 jiwa, mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi sebesar 619.125 jiwa untuk penduduk laki-laki dan 614.570 jiwa untuk penduduk perempuan.

Untuk membandingkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Magelang per tahun, digunakan laju pertumbuhan aritmatik. Tingkat pertumbuhan penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Magelang tahun 2014 lebih rendah dibanding tahun 2013 yakni sebesar 0,98 persen. Ini menunjukkan bahwa penambahan penduduk di tahun 2014 ini berhasil dikendalikan.

3.2.2 Komposisi Penduduk Kabupaten Magelang

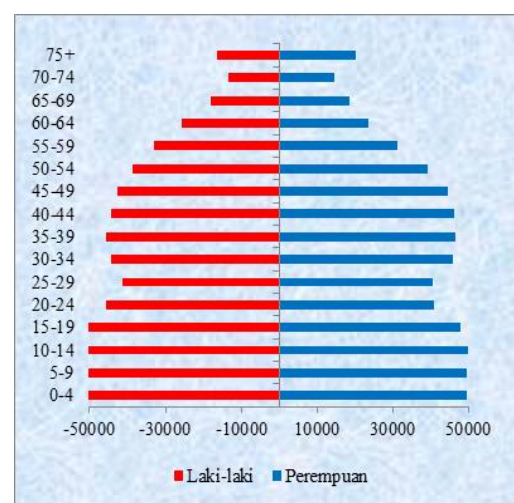
Komposisi penduduk menggambarkan susunan penduduk yang dibuat berdasarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik-karakteristik yang sama. Berbagai macam komposisi penduduk dapat dibuat, namun pada bab ini hanya akan dibahas tentang komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin Kabupaten Magelang digambarkan dalam piramida penduduk untuk lebih memperjelas dalam pemahamannya. Piramida disajikan dalam rentang waktu lima tahunan. Setiap batang piramida, mewakili satu kohor penduduk yang berasal dari kohor kelahiran yang sama, yang disusun menurut kelompok umur lima tahunan. Dalam perkembangannya, kohor tersebut pasti mengalami berbagai perubahan demografi baik itu kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*) dan perpindahan penduduk (*migrasi*). Komponen fertilitas hanya akan mempengaruhi penduduk pada dasar piramida (kelompok umur 0 – 4 tahun), sedangkan komponen mortalitas dan migrasi dapat berpengaruh pada seluruh kelompok umur.

Grafik 3.2
Piramida Penduduk, 2010



Sumber data : BPS Kabupaten Magelang

Grafik 3.3
Piramida Penduduk, 2014



Sumber data : BPS Kabupaten Magelang

Secara umum bentuk piramida penduduk Kabupaten Magelang pada tahun 2010 dan 2014 menunjukkan kesamaan pola. Dilihat dari dua piramida diatas, untuk kelompok umur 0-19 tahun, mempunyai panjang batang cenderung sama dan lebih panjang dibanding kelompok umur diatasnya. Kondisi ini menjelaskan struktur penduduk pada dua tahun tersebut, jumlah penduduk mudanya cenderung lebih besar.

Pada tahun 2010 terjadi penurunan jumlah penduduk di kelompok umur (20-24) tahun dan kemudian meningkat lagi di kelompok umur (25-29) tahun. Hal ini dimungkinkan pengaruh migrasi keluar pada kelompok umur (20-24) tahun untuk mencari pekerjaan dan migrasi masuk pada kelompok umur (25-29) tahun untuk berkeluarga. Pola tersebut hampir sama dengan penduduk pada kelompok umur (20-24) tahun di tahun 2014.

Untuk struktur penduduk di usia produktif memperlihatkan persamaan bentuk di kedua piramida diatas. Pada dua tahun tersebut terlihat bahwa kelompok penduduk usia produktif mulai mengecil dibanding kelompok usia muda. Dan terus mengecil pada penduduk kelompok usia tua.

Rasio Jenis Kelamin (*sex ratio*) adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan dikalikan 100. *Sex Ratio* pada kohor kelahiran (0-4) tahun selalu bernilai di atas 100, yang berarti lebih banyak penduduk laki-laki daripada penduduk perempuan. Hal tersebut dikarenakan peluang kelahiran bayi laki-laki lebih besar daripada bayi perempuan.

Untuk kelompok umur 15-64 tahun, *sex ratio* berdasarkan kelompok umur tersebut sangat dipengaruhi oleh peristiwa migrasi penduduk. *Sex ratio* yang lebih kecil dari 100 menunjukkan bahwa pada kelompok umur tersebut migrasi keluar dari Kabupaten Magelang banyak dilakukan oleh penduduk laki-laki atau banyak migrasi masuk dari penduduk perempuan. Hal ini mulai terlihat pada kelompok umur (30-34) sampai kelompok umur (45-49) tahun. Akan tetapi, pada kelompok umur (50-54) tahun terjadi perbedaan pola antara tahun 2010 dengan tahun 2014. Bila pada tahun

2010 untuk kelompok umur tersebut, kecenderungan penduduk laki-laki lebih banyak namun pada tahun 2014 berubah menjadi penduduk perempuan yang lebih banyak yaitu terlihat dari *sex ratio* yang lebih kecil dari 100. Perbedaan juga pada kelompok umur (60-64), di tahun 2014 *sex ratio*nya menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk wanita.

Selain dipengaruhi oleh migrasi, variasi *sex ratio* menurut kelompok umur pada dasarnya disebabkan oleh peristiwa kematian penduduk. Seiring bertambahnya usia, peluang kematian penduduk laki-laki akan lebih besar dibanding penduduk perempuan, hal ini terlihat pada Tabel 3.1 dimana nilai *sex ratio* pada kelompok umur 65+ selalu lebih kecil dari 100, yang berarti jumlah penduduk perempuan pada kelompok umur tua selalu lebih besar daripada penduduk laki-laki. Hal tersebut berkaitan dengan angka harapan hidup (e_0) perempuan yang lebih tinggi dari laki-laki.

Tabel 3.1
Ratio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Magelang
Menurut Kelompok Umur, 2010 dan 2014

Kelompok Umur	Tahun	
	2010	2014
(1)	(2)	(3)
0 – 4	103,13	103,18
5 – 9	105,12	105,49
10 – 14	107,89	107,61
15 – 19	108,31	110,27
20 – 24	106.,78	110,62
25 – 29	101,51	103,77
30 – 34	99,35	97,26
35 – 39	98,04	97,66
40 – 44	95,45	95,99
45 – 49	95,79	94,40
50 – 54	101,19	95,71
55 – 59	104,86	101,04
60 – 64	97,06	103,95
65 – 69	92,64	93,19
70 – 74	88,56	90,44
75+	76,82	78,39

Sumber: BPS Kabupaten Magelang

Penduduk selain dikategorikan dalam kelompok umur lima tahunan, juga dikelompokkan menjadi 3 kelompok umur, yaitu kelompok umur muda (0-14) tahun, kelompok usia produktif (15-64) tahun, dan kelompok umur tua (65+) tahun. Perbandingan jumlah penduduk pada ketiga kelompok umur tersebut dapat dilihat dari nilai angka ketergantungan total (*dependency ratio total*). Secara kasar dapat diartikan bahwa *dependency ratio* merupakan salah satu indikator maju mundurnya ekonomi suatu wilayah, dengan kata lain semakin tinggi *dependency ratio* semakin rendah kemakmuran suatu wilayah. Untuk memperoleh *dependency ratio total*, terlebih dahulu harus diketahui *dependency ratio* penduduk muda dan *dependency ratio* penduduk tua.

Tabel 3.2
Dependency Ratio Penduduk Kabupaten Magelang, 2010 dan 2014

Tahun	Jenis Kelamin	Dependency Ratio Muda	Dependency Ratio Tua	Dependency Ratio Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	L	40,01	10,64	50,65
	P	38,28	12,53	50,82
2014	L	37,66	11,50	49,16
	P	36,04	13,36	49,40

Sumber data: BPS Kabupaten Magelang

Dependency ratio penduduk Kabupaten Magelang pada tahun 2010 dan tahun 2014 mempunyai pola yang sama untuk penduduk menurut jenis kelamin dimana penduduk perempuan mempunyai *Dependency Ratio* Muda lebih kecil dibanding penduduk laki-laki. Sedangkan untuk *Dependency Ratio* Tua, penduduk perempuan mempunyai angka lebih besar. Kondisi ini disebabkan karena di usia tua jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki.

Angka *Dependency Ratio* Total di tahun 2014 tercatat penduduk perempuan mempunyai angka *dependency ratio* sebesar 49,40 dan penduduk laki-laki 49,16. Ini dapat diartikan bahwa dari setiap 100 orang usia produktif (15-64) tahun harus

menanggung 49 orang penduduk perempuan usia non produktif (0-14 dan 65+) tahun dan menanggung 49 orang penduduk laki-laki. Dari Tabel 3.2 terlihat bahwa terjadi penurunan *dependency ratio* penduduk muda, sementara *dependency ratio* penduduk tua cenderung meningkat. Kondisi ini tentu saja merupakan suatu gambaran yang menggembirakan, yang mengidentifikasi rendahnya angka kelahiran dan rendahnya kematian penduduk usia lansia serta meningkatnya angka harapan hidup di Kabupaten Magelang selama kurun waktu tersebut.

3.2.3 Kepadatan Penduduk

Luas wilayah Kabupaten Magelang adalah 1 085,73 km² dengan kepadatan penduduk pada tahun 2014 sebesar 1 136 jiwa per km². Kecamatan Muntilan dan Kecamatan Mertoyudan merupakan Kecamatan dengan kepadatan diatas 2 000 jiwa per km²-nya. Urutan terpadatnya adalah Kecamatan Muntilan (2 728 jiwa per km²) dan selanjutnya adalah Kecamatan Mertoyudan (2 453 jiwa per km²). Kecamatan Mungkid menempati urutan ketiga dengan kepadatan sebesar 1 938 jiwa per km². Sementara itu Kecamatan Kajoran yang menyandang predikat kecamatan terluas di Kabupaten Magelang mempunyai kepadatan terendah yakni dengan luas wilayah 83,41 km² mempunyai kepadatan sebesar 631 jiwa per km². Kecamatan Ngluwar dengan luas wilayah terkecil di Kabupaten Magelang menempati urutan ke tujuh dalam urutan kepadatan penduduk yakni dengan luas wilayah 22,44 km² mempunyai kepadatan sebesar 1 372 jiwa per km².

Bila dilihat dari distribusi penduduknya, tiga kecamatan yang mempunyai sumbangan terbesar terhadap total penduduk Kabupaten Magelang berturut-turut adalah Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Grabag dan Kecamatan Secang masing-masing sebesar 9,02 persen, 6,85 persen, dan 6,43 persen. Sedangkan Kecamatan Ngluwar memberikan sumbangan terendah terhadap jumlah penduduk Kabupaten Magelang secara keseluruhan yaitu sebesar 2,50 persen.

Tabel 3.3
Distribusi dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang, 2014

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Distribusi Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk Per Km ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Salaman	68,87	68 656	5,57	997
2	Borobudur	54,55	57 672	4,67	1 057
3	Ngluwar	22,44	30 795	2,50	1 372
4	Salam	31,63	46 314	3,75	1 464
5	Srumbung	53,18	47 340	3,84	890
6	Dukun	53,4	44 787	3,63	839
7	Muntilan	28,61	78 043	6,33	2 728
8	Mungkid	37,4	72 464	5,87	1 938
9	Sawangan	72,37	56 010	4,54	774
10	Candimulyo	46,95	47 445	3,85	1 011
11	Mertoyudan	45,35	111 248	9,02	2 453
12	Tempuran	49,04	48 475	3,93	988
13	Kajoran	83,41	52 644	4,27	631
14	Kaliangkrik	57,34	54 339	4,40	948
15	Bandongan	45,79	56 636	4,59	1 237
16	Windusari	61,65	48 707	3,95	790
17	Secang	47,34	79 325	6,43	1 676
18	Tegalrejo	35,89	55 989	4,54	1 560
19	Pakis	69,56	53 628	4,35	771
20	Grabag	77,16	84 567	6,85	1 096
21	Ngablak	43,8	38 611	3,13	882
	Jumlah	1 085,73	1 233 695	100,00	1 136

Sumber data: BPS Kabupaten Magelang

3.3. Kondisi Ekonomi

Perekonomian yang semakin baik akan semakin meningkatkan upaya dari masyarakat terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia. Perekonomian yang baik dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya. Semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi dan bernilai positif akan semakin baik perekonomian suatu

daerah. Dengan perekonomian yang baik diharapkan semakin banyak uang yang diperoleh penduduk sebagai pendapatan, maka semakin banyak uang yang dapat dibelanjakan sehingga dapat menaikkan besaran pendapatan regional. Tabel-tabel berikut menyajikan tinjauan perekonomian Kabupaten Magelang.

Tabel 3.4
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000
Serta Perkembangannya di Kabupaten Magelang, 2010 - 2014

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000	
	Nilai (Juta Rp)	Perkembangan (%)	Nilai (Juta Rp)	Perkembangan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	8 022 322,50	298,18	4 116 390,07	153,00
2011	8 770 808,70	326,00	4 292 354,45	159,54
2012	9 736 556,38	361,90	4 542 888,66	168,85
2013	10 814 289,76	401,95	4 797 319,01	178,31
2014	12 012 292,98	446,48	5 059 200,54	188,04

Sumber data : BPS Kabupaten Magelang

Dari tabel 3.4 terlihat bahwa PDRB Kabupaten Magelang terus meningkat besarnya selama lima tahun terakhir (2010-2014). Pada tahun 2010, PDRB Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku sebesar 8 022,32 milyar rupiah naik menjadi 12 012,29 milyar rupiah pada tahun 2014.

Perkembangan PDRB perkapita di Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan peningkatan. Dimana PDRB perkapita dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Pada tahun 2014, PDRB perkapita Kabupaten Magelang sebesar Rp. 9 736 841,75 atau naik sebesar 9,99 persen dari tahun 2013. Demikian juga PDRB perkapita atas dasar harga konstan, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir selalu mengalami kenaikan meskipun kenaikannya tidak sebesar harga berlaku.

Tabel 3.5
PDRB Perkapita Kabupaten Magelang, 2010 - 2014

Tahun	PDRB per kapita (Rp)		Pertumbuhan (%)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan 2000	Harga Berlaku	Harga Konstan 2000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	6 784 073,12	3 481 023,26	11,49	3,87
2011	7 371 214,15	3 607 405,54	8,65	3,63
2012	7 984 900,72	3 725 600,05	8,33	3,28
2013	8 851 975,08	3 926 818,06	10,86	5,40
2014	9 736 841,75	4 100 851,95	9,99	4,43

Sumber data : BPS Kabupaten Magelang

Tabel 3.6
Pertumbuhan Sektor Ekonomi di Kabupaten Magelang, 2010 - 2014 (Persen)

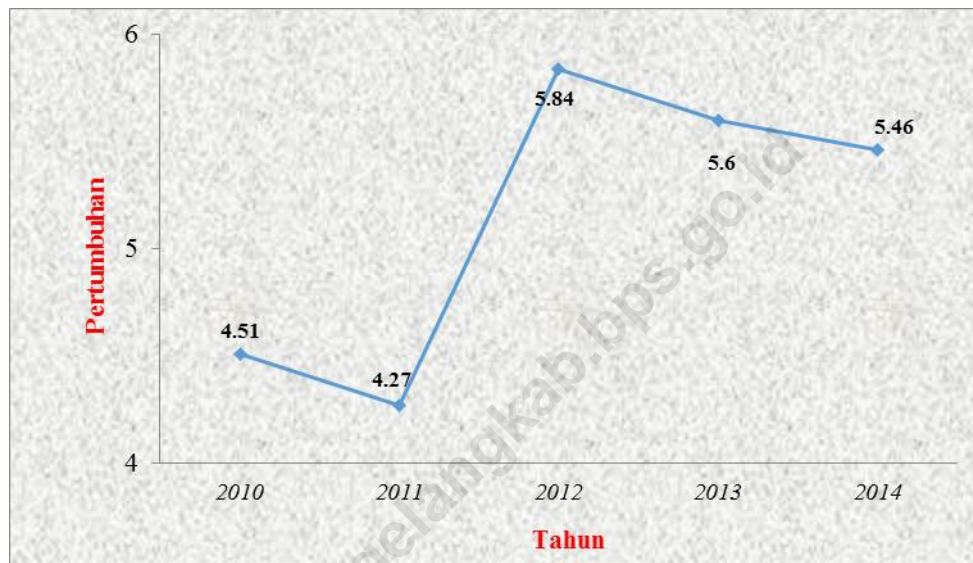
Sektor	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	1,58	-0,19	3,18	2,87	3,27
Pertambangan dan Penggalian	7,58	8,66	6,32	5,65	2,26
Industri Pengolahan	3,76	3,65	5,86	6,39	6,03
Listrik, Gas dan Air Minum	8,26	4,56	5,81	8,39	5,65
Bangunan / Konstruksi	7,06	8,48	7,08	7,57	7,65
Perdagangan, Restoran dan Hotel	4,54	3,86	6,45	7,11	6,07
Pengangkutan dan Komunikasi	6,17	5,95	7,00	6,55	7,99
Kuangan , Perswn dan Jasa Pers	4,05	4,96	5,59	7,77	6,56
Jasa - jasa	7,71	8,66	8,06	5,73	5,75
PDRB	4,51	4,27	5,84	5,60	5,46

Sumber data : BPS Kabupaten Magelang

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang pada tiga tahun terakhir (2012 – 2014) secara agregat mengalami pertumbuhan yang cukup baik, yaitu diatas 5 (lima) persen. Sedangkan selama periode 2010 sampai 2011, perekonomian Kabupaten Magelang hanya tumbuh pada kisaran 4 (empat) persen. Pada tahun 2014, sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami pertumbuhan tertinggi kemudian disusul

sektor bangunan/konstruksi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor perdagangan, restoran dan hotel.

Grafik 3.4
Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Magelang, 2010 - 2014



Sumber data : BPS Kabupaten Magelang

Tabel 3.7
Struktur Ekonomi Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku, 2010 – 2014 (Persen)

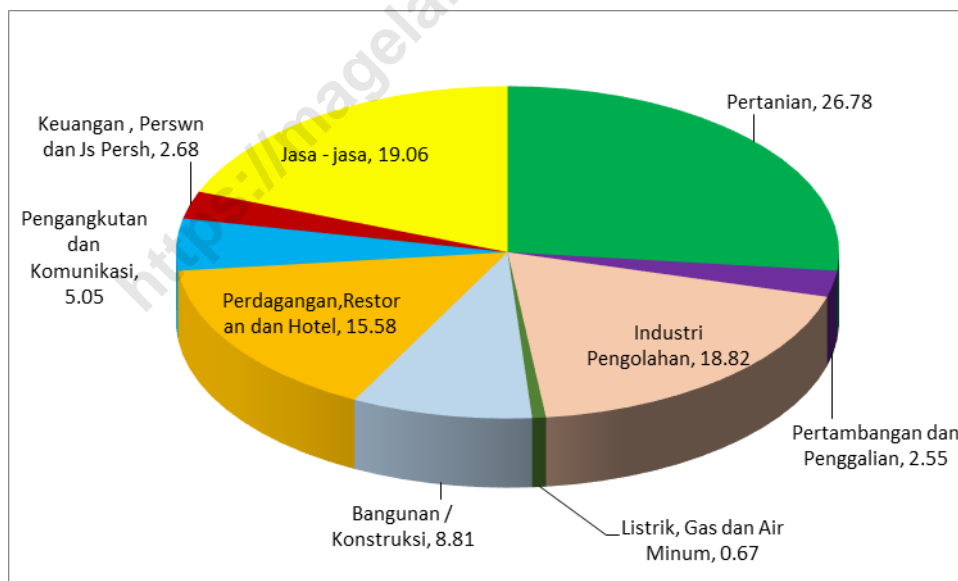
Sektor	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	29,60	28,79	28,31	27,83	26,78
Pertambangan dan Penggalian	2,54	2,61	2,58	2,62	2,55
Industri Pengolahan	18,00	18,27	18,59	18,71	18,82
Listrik, Gas dan Air Minum	0,68	0,67	0,66	0,69	0,67
Bangunan / Konstruksi	8,29	8,50	8,57	8,66	8,81
Perdagangan, Restoran dan Hotel	15,04	14,99	15,19	15,16	15,58
Pengangkutan dan Komunikasi	5,05	5,07	5,03	5,03	5,05
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	2,67	2,62	2,55	2,60	2,68
Jasa - jasa	18,13	18,51	18,51	18,70	19,06
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data : BPS Kabupaten Magelang

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, sektor pertanian masih merupakan sektor yang menjadi andalan di Kabupaten Magelang. Sumbangannya terhadap total PDRB Kabupaten Magelang hampir mencapai 30 persen, paling tinggi dibandingkan sektor lainnya. Hal ini sejalan dengan kondisi Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah agraris.

Sektor jasa-jasa menjadi sektor dominan setelah sektor pertanian dengan memberikan sumbangan sebesar 19,06 persen. Disusul berikutnya sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, restoran dan hotel dengan sumbangan masing-masing sebesar 18,82 persen dan 15,58persen. Sedangkan sektor listrik, gas, dan air minum memberikan sumbangan terkecil yakni hanya sebesar 0,67 persen.

Grafik 3.5
Struktur Ekonomi Kabupaten Magelang
Atas Dasar Harga Berlaku, 2014



Sumber data : BPS Kabupaten Magelang

3.4. Laju Inflasi

Sisi lain untuk melihat kondisi perekonomian adalah dari angka inflasi yang menunjukkan indikator stabilitas ekonomi dan mencerminkan perubahan harga di suatu wilayah.

Ada harapan yang berbeda dari masyarakat antara laju pertumbuhan ekonomi dengan besarnya angka inflasi, Masyarakat berharap laju pertumbuhan ekonomi tiap tahunnya selalu bernilai positif dan dalam angka yang cukup besar. Sebaliknya untuk angka inflasi diharapkan selalu mendekati angka 0 (nol). Harapan yang berbeda dari munculnya dua angka tersebut dikarenakan masyarakat berharap ada penambahan pendapatan yang cukup signifikan, akan tetapi harga barang dan jasa yang dibeli tidak mengalami kenaikan harga. Sehingga kesejahteraan yang diidam-idamkan akan semakin mendekati kenyataan.

Tabel 3.8
Laju Inflasi Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dan Nasional,
2010 - 2014

Tahun	Kab Magelang	Jawa Tengah	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)
2010	8,25	6,88	6,96
2011	2,64	2,68	3,79
2012	2,59	4,24	4,30
2013	8,34	7,99	8,38
2014	7,91	8,22	8,36

Sumber data : BPS Kabupaten Magelang

Hasil tinjauan selama 5 (lima) tahun terakhir pada tabel 3.8 diatas, bahwa dari tahun 2010 sampai 2014 secara umum terjadi fluktuasi laju inflasi baik di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Nasional. Laju inflasi yang cukup tinggi pada ketiga wilayah ini terjadi pada tahun 2010, 2013, dan 2014 di mana pada tiga tahun ini terjadi kenaikan barang dan jasa yang menyebabkan laju inflasi cukup tinggi. Tingginya angka inflasi tersebut antara lain adalah akibat kebijakan Pemerintah Pusat dengan menaikkan kembali harga BBM. Keberhasilan menekan laju inflasi di tahun berikutnya, menunjukkan bahwa fluktuasi harga barang dan jasa di Kabupaten Magelang masih dapat dikendalikan.

Besarnya inflasi di tahun 2014, bila dilihat menurut kelompok pengeluaran selama periode Januari - Desember 2014, maka tingkat inflasinya adalah sebagai berikut: kelompok bahan makanan sebesar 13,02 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 5,23 persen; kelompok perumahan sebesar 7,83 persen; kelompok sandang sebesar 3,44 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,30 persen; kelompok pendidikan dan kelompok transport masing-masing 2,36 persen dan 10,48 persen.

<https://magelangkab.bps.go.id>



Bab IV Kondisi Pembangunan Manusia

4.1. Pembangunan Manusia

Pembangunan menurut David Korten adalah suatu proses yang didalamnya anggota masyarakat bisa meningkatkan kemampuan pribadi dan kelembagaan mereka, untuk mengerahkan dan mengelola sumber-sumber yang tersedia, demi menciptakan perbaikan-perbaikan mutu kehidupan mereka secara bersinambungan dan adil, sesuai dengan aspirasi-aspirasi mereka sendiri.

Pernyataan tersebut menekankan bahwa pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi merupakan tanggung jawab individu, anggota masyarakat dan juga lembaga-lembaga yang ada. Ditekankan pula bahwa pembangunan bukanlah soal pertumbuhan atau peningkatan hasil, melainkan transformasi yang merujuk pada keadilan, kesinambungan, dan inklusifitas sebagai kebutuhan pokok bagi masyarakat global.

UNDP dalam *Human Development Report*-nya yang pertama (1990) menyatakan bahwa manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan sederhana, tetapi sering terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang.

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki manusia. Diantara berbagai pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmupengetahuan dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Diantara pilihan yang tak kalah pentingnya adalah kebebasan berpolitik, jaminan atas hak asasi dan harga diri. Dengan demikian pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan peningkatan kemampuan manusia, seperti meningkatkan kesehatan dan pendidikan. Pembangunan manusia juga mementingkan apa yang bisa

dilakukan oleh manusia dengan kemampuan yang dimilikinya untuk bersenang-senang, untuk melakukan kegiatan produktif, atau untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan budaya, sosial dan politik. Pembangunan manusia harus menyeimbangkan semua aspek tersebut.

Paradigma pembangunan manusia mengandung empat komponen utama :

1. Produktifitas

Manusia harus berkemampuan untuk meningkatkan produktifitasnya dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan lapangan kerja. Oleh karenanya, pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.

2. Pemerataan

Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan sehingga semua orang dapat berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan dari peluang yang tersedia.

3. Keberlanjutan

Akses terhadap peluang/kesempatan harus tersedia bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Semua bentuk sumber daya fisik harus dapat diperbaharui.

4. Pemberdayaan

Pembangunan harus dilakukan oleh semua orang, bukannya semata-mata (dilakukan) untuk semua orang. Semua orang harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.



4.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada hakekatnya, tujuan visi dan misi Kabupaten Magelang yang telah ditetapkan baik dalam Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Magelang maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Panjang (RPJM/RPJP) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

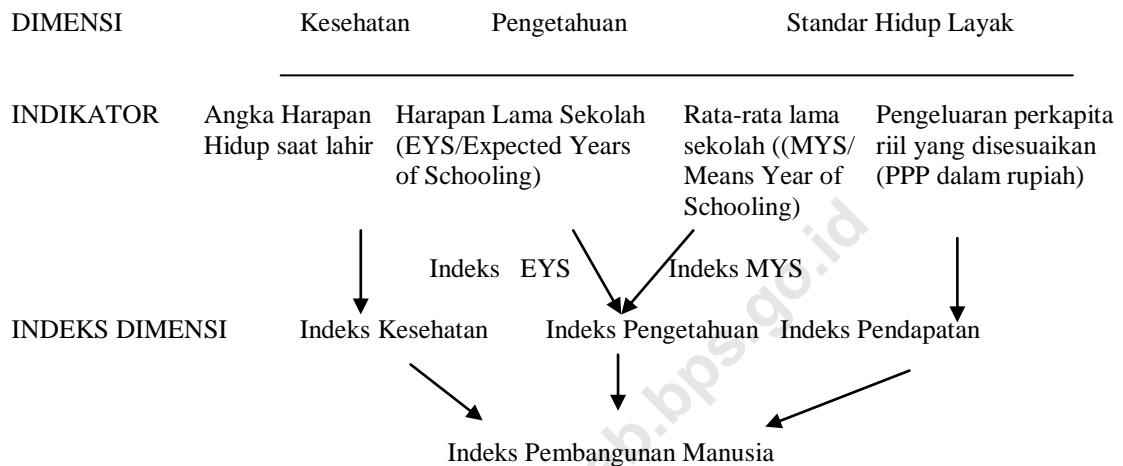
Guna mengukur tingkat keberhasilan pembangunan, banyak indikator yang dapat dijadikan sebagai alat ukur. Indikator tersebut dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu indikator tunggal dan indikator komposit. Contoh indikator tunggal adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pertumbuhan PDRB dan tingkat perubahan harga barang dan jasa diukur dengan Indeks Harga Konsumen (IHK). Sedangkan yang termasuk indikator komposit salah satunya adalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia).

IPM mengukur tingkat pencapaian keseluruhan dari suatu wilayah negara/propinsi/kabupaten/kota dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu kesehatan, pengetahuan dan standar hidup layak. Ketiganya diukur dengan angka harapan hidup, pencapaian pendidikan dan pendapatan perkapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. (*UNDP : Human Development Report 2001*).

Lebih jauh UNDP menyatakan bahwa IPM adalah suatu ringkasan dan bukan suatu ukuran komprehensif dari pembangunan manusia. IPM memang dirancang untuk mengukur tingkat kemajuan sosial ekonomi. Angka IPM hanya memberi indikasi saja. Tetapi dengan menghitung IPM merupakan langkah yang jauh lebih maju dari pada langkah terdahulu yang hanya terkonsentrasi pada tingkat pendapatan saja.



Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia dapat dilihat dari diagram berikut ini.



IPM merupakan angka agregat yang dapat diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimum 100. Bagi suatu wilayah angka IPM yang diperoleh menggambarkan kemajuan pembangunan manusia di daerah tersebut, merupakan tantangan yang harus dihadapi dan upaya apa yang harus dilakukan untuk mengurangi jarak yang harus ditempuh. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang disusun dari tiga indikator : lama hidup yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah (rata-rata jumlah tahun yang telah dijalani) dan harapan lama sekolah; dan standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita (PPP - *Puchasing Power Parity*/Paritas Daya Beli - dalam rupiah). IPM secara matematis merupakan rata-rata geometri dari ketiga komponen indeks tersebut.

4.3. Nilai Dan Posisi IPM

IPM dihitung untuk mengungkapkan status pembangunan manusia. Dari nilai IPM tahun 2014 yang sebesar 66,35 menjadikan Kabupaten Magelang masuk kategori sedang karena nilai IPM berkisar antara 60 s.d. kurang dari 70 (menurut

skala internasional). Daerah yang masuk kategori pembangunan manusianya sangat tinggi apabila nilai IPM-nya lebih dari atau sama dengan 80, kategori tinggi apabila nilai IPM berkisar 70 s.d. kurang dari 80 dan daerah dengan kelas pembangunan manusianya rendah apabila IPM-nya kurang dari 60.

Tabel 4.1
Nilai dan Peringkat IPM Kabupaten/Kota se-Karesidenan Kedu, 2014

No	Kabupaten/ Kota	Nilai IPM	Peringkat Kedu	Peringkat Jateng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kab. Kebumen	65,67	5	29
2	Kab. Purworejo	70,12	2	14
3	Kab. Wonosobo	65,20	6	30
4	Kab. Magelang	66,35	3	25
5	Kab. Temanggung	65,97	4	27
6	Kota Magelang	75,79	1	4

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Predikat pembangunan manusia dengan kategori sedang diperoleh oleh 4 (empat) kabupaten/kota di Karesidenan Kedu. Sedangkan 2 kabupaten/kota lainnya masuk kategori tinggi. Namun bila nilai indeksnya diperbandingkan, maka akan didapat bahwa Kabupaten Magelang menduduki posisi ke-3 se Karesidenan Kedu setelah Kabupaten Purworejo yang berada pada urutan kedua, dan Kota Magelang yang berada pada urutan pertama. Sedangkan pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang berada pada urutan ke 25.

4.4. Komponen-Komponen IPM

Sudah dijelaskan pada bahasan sebelumnya bahwa IPM disusun oleh tiga indikator: kesehatan yang diukur dengan Angka Harapan Hidup Ketika Lahir (e_0); pendidikan yang diukur berdasarkan Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS); dan standar hidup yang diukur dengan Pengeluaran Per Kapita

(PPP - *Purchasing Power Parity*/paritas daya beli - dalam rupiah). Pada bahasan kali ini akan dibicarakan nilai dari masing-masing komponen IPM tersebut.

Perubahan angka yang terjadi pada komponen IPM sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel atau indikator pendukung. Jenis variabel atau indikator tersebut terbagi kedalam indikator input, proses dan output. Sebagai contoh: Angka Harapan Hidup merupakan indikator dampak (output) dari angka kematian bayi sebagai sasaran pembangunan. Angka kematian bayi sendiri dipengaruhi oleh cakupan imunisasi, penolong persalinan dan lain sebagainya (merupakan indikator proses).

Angka IPM Kabupaten Magelang tahun 2014 sebesar 66,35 dan berada pada peringkat ke-3 se Karesidenen Kedu ini, bila dilihat dari komponen-komponen IPM Kabupaten Magelang seperti pada tabel 3.4 tercatat bahwa angka harapan hidup dan harapan lama sekolah masyarakat Kabupaten Magelang berada di urutan ke-4. Rata-rata lama sekolah berada di urutan ke-3 dan untuk pengeluaran riil perkapita penduduk berada pada urutan ke-5. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan pembangunan di setiap Kabupaten/Kota se-Karesidenan Kedu menghasilkan output yang berbeda-beda dampaknya terhadap pembangunan manusia.



Tabel 4.2
Nilai Komponen-Komponen IPM Kabupaten/Kota se-Karesidenan Kedu, 2014

No	Kabupaten	Angka Harapan Hidup (tahun)		Harapan Lama Sekolah (persen)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran Riil Per Kapita disesuaikan (Rp 000)	
		Nilai	Peringkat	Nilai	Peringkat	Nilai	Peringkat	Nilai	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kab. Kebumen	72,67	5	12,07	3	6,75	4	7 755	6
2	Kab. Purworejo	73,83	3	13,03	1	7,63	2	9 189	3
3	Kab. Wonosobo	70,82	6	11,34	6	6,07	6	9 491	2
4	Kab. Magelang	73,25	4	12,00	4	7,02	3	7 877	5
5	Kab. Temanggung	75,34	2	11,69	5	6,18	5	8 062	4
6	Kota Magelang	76,57	1	12,98	2	10,27	1	10 344	1

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

4.4.1. Angka Harapan Hidup (e_0)

Angka harapan hidup dapat diartikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka ini dapat dihitung dengan bantuan tabel kematian (*life tabel*) dan beberapa program paket komputer. Angka harapan hidup diharapkan mencerminkan “lama hidup” dan “hidup sehat”. Lama hidup seseorang, tidak terlepas dari kesehatan orang tersebut. Usia hidup panjang tanpa didukung oleh kesehatan yang baik tentunya akan menjadi beban. Dengan kata lain, apabila membicarakan usia harapan hidup maka tidak akan terlepas dari pembicaraan upaya peningkatan taraf kesehatan.

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Magelang tahun 2014 adalah 73,25 tahun. Artinya, pada tahun 2014 seorang penduduk Kabupaten Magelang akan mempunyai harapan untuk terus hidup sampai usia 73,25 tahun. Dari tahun ke tahun angka harapan hidup di Kabupaten Magelang selalu meningkat, ini menunjukkan bahwa

penduduk Kabupaten Magelang memiliki harapan untuk terus hidup bertambah. Hal ini dimungkinkan karena masyarakat sudah semakin peduli dengan pentingnya kesehatan sehingga angka harapan hidupnya terus meningkat.

Tabel 4.3
Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota se-Karesidenan Kedu, 2010 - 2014

No	Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup/(e ₀) (tahun)				
		2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Kebumen	72,24	72,36	72,49	72,61	72,67
2	Kab. Purworejo	73,45	73,56	73,66	73,77	73,83
3	Kab. Wonosobo	70,37	70,50	70,63	70,76	70,82
4	Kab. Magelang	73,00	73,07	73,14	73,21	73,25
5	Kab. Temanggung	75,17	75,22	75,26	75,31	75,34
6	Kota Magelang	76,39	76,44	76,49	76,54	76,57
	Jawa Tengah	72,73	72,91	73,09	73,28	73,88

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Selama tahun 2010 sampai tahun 2014, keterbandingan secara kewilayahan se-Karesidenan Kedu, angka harapan hidup Kabupaten Magelang menempati posisi ke-4. Bila dibandingkan dengan Jawa Tengah, angka harapan hidup Kabupaten Magelang tahun 2013 dan tahun 2014 secara umum masih dibawah angka harapan hidup Jawa Tengah.

Angka harapan hidup yang cukup tinggi tersebut merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan. Pernyataan tersebut berdasarkan pada asumsi bahwa lama hidup seseorang dipengaruhi oleh tingkat kesehatan yang tinggi, asupan gizi yang baik dan kepedulian terhadap kesehatan dengan cara merawatnya yang cukup tinggi.

Faktor kesehatan balita, ibu hamil dan penyebab kematian pada usia balita saat ibu melahirkan sangat perlu diperhatikan. Semakin dini kesehatan balita dan ibu

hamil diperhatikan dan dengan bekal gizi yang baik, diharapkan taraf kesehatan juga akan semakin baik. Dengan demikian harapan hidup panjang akan lebih terwujud.

4.4.2. Pendidikan

Indeks pendidikan bisa dihitung setelah didapat Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS). Berikut ini akan dibahas secara singkat tentang kedua indikator tersebut.

4.4.2.1. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 (tujuh) tahun di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung pada usia 7 (tujuh) tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, Harapan lama sekolah dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren dari Direktorat Pendidikan Islam.

Harapan lama sekolah masyarakat Kabupaten Magelang pada tahun 2014 tercatat sebesar 12,00 tahun. Bila diamati se-Karesidenan Kedu, harapan lama sekolah Kabupaten Magelang ini berada pada urutan ke-4 setelah Kabupaten Purworejo, Kota Magelang, dan Kabupaten Kebumen. Angka yang cukup tinggi ini diperoleh berkat upaya Pemerintah Kabupaten Magelang yang sungguh-sungguh untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Dan ini merupakan langkah awal yang cukup baik sebagai pijakan untuk pembangunan sumber daya manusia dimasa yang akan datang. Upaya yang telah dilaksanakan tersebut diantaranya dengan mendekatkan sarana pendidikan dasar ke tempat tinggal penduduk dengan tersebarnya Sekolah Dasar (SD) ke semua desa.

Tabel 4.4
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Karesidenan Kedu,
2010 - 2014

No	Kabupaten/Kota	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)				
		2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Kebumen	11,04	11,65	11,74	11,83	12,07
2	Kab. Purworejo	12,26	12,69	12,74	12,83	13,03
3	Kab. Wonosobo	9,96	10,09	10,83	11,03	11,34
4	Kab. Magelang	10,82	10,96	11,08	11,76	12,00
5	Kab. Temanggung	10,24	10,70	11,05	11,39	11,69
6	Kota Magelang	12,22	12,33	12,49	12,65	12,98
Jawa Tengah		11,09	11,18	11,39	11,89	12,17

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

4.4.2.2. Rata-Rata Lama Sekolah (MYS)

Indikator untuk mengukur pembangunan manusia dibidang pendidikan lainnya yaitu rata-rata lama sekolah. Indikator ini memberikan rata-rata waktu yang ditempuh penduduk dalam kegiatan pembelajaran secara formal. Populasi yang dipakai UNDP dalam menghitung rata-rata lama sekolah dibatasi pada penduduk usia 25 tahun keatas. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah sehingga belum pantas ditanyakan rata-rata lama sekolahnya. Tetapi dalam pembahasan ini yang digunakan adalah penduduk berusia 15 tahun keatas dan penghitungan rata-rata lama sekolahnya memakai metode tidak langsung, dengan memberikan bobot kepada tiap jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Tingkat kemampuan baca tulis masyarakat yang cukup tinggi belum diimbangi dengan kesadaran dari masyarakat untuk mengenyam pendidikan formal yang lebih panjang. Ini dibuktikan dengan besaran angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Magelang tahun 2014 sebesar 7,02 tahun.

Bila dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota se-Karesidenan Kedu, lamanya sekolah masyarakat Kabupaten Magelang yang pada tahun 2014 pada urutan ketiga setelah Kota Magelang dan Kabupaten Purworejo. Dengan rata-rata lama sekolah yang sebesar 7,02 tahun, dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata masyarakat Kabupaten Magelang telah menempuh pendidikan selama 7,02 tahun atau setara menduduki bangku kelas 1 (satu) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Tabel 4.5
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Karesidenan Kedu, 2010 - 2014

No	Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)				
		2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Kebumen	6,21	6,29	6,30	6,39	6,75
2	Kab. Purworejo	7,39	7,45	7,51	7,57	7,63
3	Kab. Wonosobo	5,81	5,87	5,90	5,92	6,07
4	Kab. Magelang	6,46	6,73	6,80	6,88	7,02
5	Kab. Temanggung	5,99	6,03	6,08	6,13	6,18
6	Kota Magelang	10,08	10,14	10,20	10,22	10,27
Jawa Tengah		6,71	6,74	6,77	6,80	6,93

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Memperhatikan tabel di atas, hasil penghitungan Angka lama sekolah untuk penduduk Kabupaten Magelang periode 2010 - 2014 mengalami kenaikan meskipun agak lamban. Walaupun wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sudah berjalan , namun masih tingginya biaya penunjang pendidikan seperti untuk anak SMP adalah biaya untuk transport dan pembelian buku-buku diluar dana BOS merupakan salah satu faktor yang menyebabkan lambannya kenaikan angka rata-rata lama sekolah ini, yang sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk mengikuti/melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Disamping itu adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah digulirkan oleh Pemerintah Pusat dan Bantuan Pendidikan, ternyata belum sepenuhnya mampu secara signifikan mengatasi mahalnya biaya pendidikan. Karena

dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Pendidikan ternyata hanya untuk mencukupi kebutuhan minimum siswa/anak didik, sehingga perlu lebih banyak lagi program-program lain yang berpihak pada mereka yang merasa keberatan atas tingginya biaya pendidikan. Disamping itu perlu diingat pula bahwa angka rata-rata lama sekolah dihitung menggunakan dasar penduduk 15 tahun keatas yang dalam kenyataannya penduduk yang sudah tua dan untuk Kabupaten Magelang umumnya mempunyai lama sekolah yang kecil sehingga mempengaruhi lambannya kenaikan angka ini.

Terlepas dari jalannya yang lamban, faktor lain dari meningkatnya angka rata-rata lama sekolah selama periode tahun 2010 sampai tahun 2014 ini dimungkinkan adanya kesadaran dari masyarakat Kabupaten Magelang yang telah putus sekolah untuk kembali ke bangku sekolah melalui sekolah-sekolah terbuka yang ada di Kabupaten Magelang, disamping mereka tetap bekerja untuk mencari penghasilan. Hal ini dikarenakan terbukanya kesempatan yang lebih banyak dan masyarakat semakin sadar akan arti pentingnya pendidikan.

4.4.3. Kemampuan Daya Beli (PPP)

Kemampuan daya beli memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat dikatakan memenuhi standar hidup layak. Dengan meningkatnya pendapatan seseorang diharapkan kemampuan daya beli akan meningkat pula, dengan syarat kenaikan pendapatan tidak dibarengi dengan kenaikan harga barang dan jasa yang jauh lebih tinggi dari kenaikan pendapatan tersebut.

Dasar penghitungan kemampuan daya beli tidak secara langsung dikaitkan dengan salah satu indikator pendapatan yang sudah dikenal luas yaitu PDRB. Alasannya karena tolok ukur pendapatan daerah, produksinya tidak langsung dirasakan oleh penduduk, alasan lainnya karena pendapatan orang yang sama belum tentu mempunyai kemampuan daya beli yang sama bila kedua orang tersebut mempunyai

tempat tinggal yang berbeda. Sehingga perlu dilakukan penghitungan daya beli yang representatif.

Selain PDRB, ada beberapa indikator yang dapat dijadikan untuk mengukur kemampuan daya beli masyarakat, seperti indeks PPP yang merupakan rata-rata konsumsi Susenas yang ditimbang dengan IHK (Indeks Harga Konsumen). Hasil evaluasi yang dilakukan dengan cara cermat didapat bahwa metode terakhir yang paling baik untuk dijadikan tolok ukur daya beli masyarakat.

Alasan mengapa rata-rata konsumsi Susenas yang ditimbang dengan IHK tidak dijadikan sebagai alat untuk mengukur kemampuan daya beli masyarakat adalah karena angka yang didapat hanya mencerminkan perbedaan daya beli masyarakat kota. Tetapi dalam penggunaannya angka IHK tetap digunakan sebagai deflator dalam penghitungan perkiraan PPP antar kabupaten/kota dalam harga konstan, sehingga angka yang disajikan dapat diperbandingkan antar daerah.

Dalam lima tahun terakhir, kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Magelang senantiasa mengalami kenaikan Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Magelang pada tahun 2014 ini sebesar Rp. 7 877 000,-. Untuk tahun ini kemampuan daya beli masyarakat di Kabupaten Magelang berada pada urutan kelima dan masih dibawah Jawa Tengah.

Tabel 4.6
Rata-rata Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten/Kota se-
Karesidenan Kedu, 2010 - 2014

No	Kabupaten/Kota	Pengeluaran Per Kapita				
		(Ribu Rupiah)				
		2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Kebumen	7,368	7,457	7,638	7,730	7,755
2	Kab. Purworejo	8,619	8,921	9,022	9,155	9,189
3	Kab. Wonosobo	9,032	9,275	9,404	9,458	9,491
4	Kab. Magelang	7,233	7,458	7,690	7,856	7,877
5	Kab. Temanggung	7,438	7,751	7,952	8,042	8,062
6	Kota Magelang	9,681	9,922	10,169	10,258	10,344
Jawa Tengah		8,992	9,296	9,497	9,618	9,640

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah



Bab V Indikator Pendukung Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan angka indeks komposit. IPM sebagai indikator pembangunan manusia membutuhkan indikator lain yang merupakan indikator input, proses maupun output pembangunan. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, pada bab ini akan dibahas indikator-indikator tunggal lainnya yang merupakan indikator dari hasil pembangunan manusia di Kabupaten Magelang. Dengan dipaparkannya indikator-indikator tunggal tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan lebih jelas tentang kondisi pembangunan manusia untuk beberapa tahun belakangan ini.

5.1. Ketenagakerjaan

Ketersediaan lapangan pekerjaan yang cukup merupakan dambaan pemerintah dan masyarakat dibelahan dunia manapun. Guna mewujudkan mimpi bersama tersebut, salah satu komitmen pemerintah adalah mengurangi jumlah pengangguran dan perlu diketahui bahwa terserapnya tenaga kerja merupakan dampak dari semakin membaiknya kondisi perekonomian secara makro.

Menurut UNICEF, seharusnya tenaga kerja adalah penduduk yang telah berusia 15 tahun keatas. Tetapi pada kenyataannya, di Indonesia masih banyak dijumpai tenaga kerja dibawah usia 15 tahun, sehingga dalam beberapa pengumpulan data usia kerja dimulai dari usia 10 tahun keatas.

Dalam pengumpulan data ketenagakerjaan, BPS membedakan penduduk kedalam dua kelompok besar yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja masih dibedakan lagi kedalam dua kelompok, yaitu kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Penduduk angkatan kerja adalah mereka yang seminggu yang lalu sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Bagi penduduk yang sedang sekolah, mengurus rumah tangga dan penduduk yang melakukan aktifitas lainnya termasuk yang tidak mampu melakukan kegiatan seperti:

jompo, pensiun, penerima pendapatan/transfer/kiriman dan sebagainya, dikelompokkan pada kelompok bukan angkatan kerja.

Yang dimaksud dengan penduduk bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan tujuan memperoleh nafkah atau membantu memperoleh nafkah paling sedikit satu jam terus menerus selama seminggu yang lalu. Kegiatan bekerja mencakup baik orang yang sedang bekerja maupun orang yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak aktif bekerja, misal: cuti, sakit dan sejenisnya.

5.1.1. Aktivitas Penduduk Usia Kerja

Angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja yang bekerja dan yang mencari pekerjaan. Hasil Susenas tahun 2014 menunjukkan bahwa sebesar 71,76 persen penduduk di Kabupaten Magelang tergolong angkatan kerja. Angka ini menurun bila dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 72,77 persen. Seperti tercantum pada tabel 4.1, dari 71,76 persen total angkatan kerja, terdiri dari penduduk yang bekerja sebanyak 66,41 persen dan yang sedang mencari pekerjaan sebesar 5,35 persen. Dari kecenderungan penurunan persentase penduduk usia kerja ini diimbangi dengan terjadinya kenaikan pada penduduk usia kerja yang sekolah dan lainnya (penduduk bukan angkatan kerja).

Penduduk bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Penduduk Kabupaten Magelang tahun 2014 yang masuk kategori bukan angkatan kerja sebesar 28,24 persen. Sumbangan terbesar untuk angka ini adalah dari penduduk yang mengurus rumah tangga sebesar 16,25 persen. Sebesar 6,86 persen sumbangan dari kegiatan bersekolah dan 5,13 persen adalah dari kegiatan lainnya.



Tabel 5.1
Persentase Angkatan Kerja dan Kegiatan yang Dilakukan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Magelang, 2011 - 2014

URAIAN	2011		2012		2013		2014	
	% thd Total	% thd Sub Total	% thd Total	% thd Sub Total	% thd Total	% thd Sub Total	% thd Total	% thd Sub Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Angkatan Kerja	64,68		65,13		72,77		71,76	
Bekerja	61,69	95,38	63,22	97,07	71,51	98,27	66,41	92,54
Mencari Kerja	2,99	4,62	1,91	2,93	1,26	1,73	5,35	7,46
Bukan Angkt. Kerja	38,32		34,87		27,23		28,24	
Sekolah	6,42	16,75	6,33	18,15	6,19	22,73	6,86	24,30
Mengurus Rmh Tangga	23,18	60,49	21,15	60,65	16,87	61,95	16,25	57,54
Lainnya	8,72	22,76	7,39	21,19	4,17	15,31	5,13	18,16
Jumlah	100,00		100,00		100,00		100,00	

Sumber data : BPS Kabupaten Magelang

5.1.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Pola perkembangan TPAK sangat dipengaruhi oleh struktur penduduk menurut umur, perkembangan sosial ekonomi dan budaya dalam suatu masyarakat.

Tabel 5.2
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Magelang, 2010 - 2014

Uraian	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
TPAK	74,08	71,52	74,52	70,35	71,76
TPT	4,97	5,98	4,47	6,22	7,45

Sumber data : BPS Kabupaten Magelang

Selama kurun waktu tahun 2010 sampai tahun 2014 terlihat bahwa jumlah angkatan kerja di Kabupaten Magelang terjadi fluktuasi. Dari tahun 2010 TPAK Kabupaten Magelang sebesar 74,08 persen, naik menjadi 74,52 di tahun 2012 kemudian turun menjadi 70,35 di tahun 2013, dan naik lagi menjadi 71,76 persen di tahun 2014. TPAK sebesar 71,76 persen dapat diartikan bahwa dari 100 penduduk usia kerja, 71 orang diantaranya merupakan angkatan kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah ukuran yang menunjukkan seberapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. TPT dihitung dari jumlah pencari kerja dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikali 100. Pada tahun 2014, TPT Kabupaten Magelang sebesar 7,45 persen, mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 6,62 persen. Menjadi pekerjaan rumah khususnya untuk Pemerintah Daerah melihat kenaikan TPT tahun ini, bagaimana mencari solusi yang tepat untuk angka TPT ini bahwa ada 7 orang yang sedang mencari kerja di tiap 100 penduduk usia kerja.

5.1.3. Penduduk Bekerja

Dari data Susenas 2014, diketahui bahwa penduduk yang bekerja di Kabupaten Magelang pada tahun ini sebesar 66,41 persen dari total penduduk usia kerja. Selama kurun waktu 2011 – 2013, jumlah penduduk yang bekerja semakin beranjak naik namun mengalami penurunan di tahun 2014.

5.1.3.1. Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan

Proporsi pekerja dilihat dari lapangan pekerjaan merupakan salah satu indikator untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja, disamping itu juga mencerminkan struktur perekonomian dari suatu wilayah. Jika dilihat dari jenis lapangan pekerjaan utama maka sektor pertanian tetap merupakan sektor yang

paling banyak menyerap tenaga kerja selama periode 2010 – 2014 yang kemudian diikuti oleh sektor perdagangan dan sektor industri.

Selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sumbangan sektor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja masih yang terbesar walaupun dari tahun ke tahun persentasenya mengalami penurunan. Penyerapan tenaga kerja untuk tahun 2014 di sektor pertanian mulai beranjak naik yaitu sebesar 38,96 persen dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebesar 37,90 persen. Walaupun kenaikannya hanya sedikit, hal ini dimungkinkan karena masyarakat mulai berkeinginan berkarya kembali di sektor pertanian, mengingat saat ini kondisi lahan pertanian yang kurang subur dan semakin menyempit. Masyarakat mulai berfikir dengan kemampuan teknologi di bidang pertanian yang mereka miliki berusaha membuat lahan pertanian dengan kondisi seperti saat ini menjadi lahan yang subur dan produktif.

Sektor-sektor lainnya yang juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2013 adalah sektor perdagangan dan sektor jasa. Orang yang bekerja di sektor perdagangan pada tahun 2014 mencapai 20,16 persen dari seluruh tenaga kerja dan sektor jasa mencapai 14,76 persen.

Tabel 5.3
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan
di Kabupaten Magelang, 2010 – 2014

Usaha	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	45,31	41,56	36,96	37,90	38,96
Perdagangan	17,68	20,41	19,33	18,64	20,16
Industri	14,79	11,96	15,27	16,08	13,10
Jasa	11,92	14,36	15,53	13,43	14,76
Lainnya	10,30	11,71	12,91	13,95	13,02
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data : BPS Kabupaten Magelang

Perkembangan daya tampung sektor industri dan sektor lainnya terhadap tenaga kerja dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 cukup fluktuatif. Dari tabel 5.3 diatas tercatat bahwa sumbangan sektor industri dan sektor lainnya terhadap penyerapan tenaga kerja tahun 2014 sebesar 13,10 persen dan sektor lainnya sebesar 13,02 persen.

5.1.3.2. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama menggambarkan perkembangan tenaga kerja terhadap tingkat kemandirian dan tingkat kebutuhannya terhadap tenaga orang lain. Hal itu dimungkinkan karena penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama dalam analisisnya meliputi penduduk yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap, bekerja dengan dibantu buruh tetap, pekerja berstatus pekerja dibayar/buruh/karyawan, pekerja bebas, dan pekerja tidak dibayar.

Tabel 5.4
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Magelang, 2010 - 2014

Status Pekerjaan Utama	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Berusaha Sendiri	16,58	17,19	16,64	17,14	18,73
Berusaha dibantu buruh tdk tetap	20,48	22,04	19,72	17,76	24,92
Berusaha dibantu buruh tetap	3,05	1,76	2,76	2,74	3,78
Buruh/karyawan/pekerja dibayar	21,29	21,28	25,36	27,39	24,89
Pekerja bebas	19,13	19,21	18,48	21,02	11,85
Pekerja tak dibayar	19,48	18,51	17,04	13,96	15,83
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data : BPS Kabupaten Magelang

Pada tabel 5.4, persentase perkembangan penduduk yang bekerja dengan status berusaha sendiri dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami kenaikan,

yaitu dari 16,58 persen menjadi 18,73 persen. Ini dimungkinkan karena biasanya orang bekerja dengan berusaha sendiri cenderung tidak konsisten dalam bekerja karena tidak tergantung orang lain. Begitu juga persentase jumlah penduduk yang bekerja dengan berusaha dibantu buruh tidak tetap mengalami banyak peningkatan. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, besarnya meningkat dari 17,76 persen menjadi 24,92 persen di tahun 2014. Hal ini diimbangi dengan kenaikan persentase jumlah pekerja tidak dibayar, yaitu dari 13,96 persen di tahun 2013 menjadi 15,83 persen pada tahun 2014.

Bila dilihat dari persentase penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pekerja dibayar dan penduduk dengan status pekerja bebas mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2013. Bahkan persentase jumlah pekerja bebas menurun drastis, yaitu dari 21,02 persen menjadi 11,85 persen. Sedangkan untuk penduduk yang bekerja dengan berusaha dibantu buruh tetap, pada tahun 2014 persentasenya menunjukkan kenaikan walaupun tidak signifikan.

5.2. Pendidikan

Salah satu indikator dalam keberhasilan pembangunan manusia adalah semakin berkualitasnya pendidikan. Dengan pendidikan yang bagus, kualitas sumber daya manusia semakin meningkat, dan Indonesia khususnya Kabupaten Magelang dengan jumlah penduduk yang besar akan menjadi potensi dengan berbekal kualitas pendidikan yang bagus, bukan sebaliknya sebagai beban pembangunan.

Indikator pokok dari keberhasilan pembangunan dibidang pendidikan adalah terbebasnya masyarakat dari buta huruf. Agar didapat kualitas penduduk yang semakin baik, maka terbebasnya penduduk dari buta huruf saja tidak cukup, perlu ada dorongan kepada masyarakat untuk memperlama masa studinya dibangku sekolah. Dengan demikian diharapkan sumber daya manusia yang cakap mampu diwujudkan untuk mengolah dan memanfaatkan semua potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah dan akhirnya dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan di segala bidang.

5.2.1. Partisipasi Sekolah

Seluruh penduduk Kabupaten Magelang berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk selalu meningkatkan partisipasi sekolah penduduk. Upaya tersebut terus dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai cara dan melalui berbagai sarana yang ada.

Tabel 5.5
Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Magelang, 2010 - 2014

Kelompok Umur	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7 - 12	98,32	98,70	99,51	99,54	99,56
13 - 15	77,21	89,35	85,30	89,06	93,24
16 - 18	48,02	58,24	58,35	54,13	59,96
19 - 24	6,81	5,32	8,02	17,58	19,90

Sumber data : BPS Kabupaten Magelang

Tingkat kesertaan penduduk dalam pendidikan formal secara umum diukur dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APS diartikan sebagai tingkat partisipasi penduduk dalam bersekolah pada kelompok penduduk usia sekolah. APK dapat dibaca sebagai tingkat partisipasi penduduk sekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan umur tersebut sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut atau tidak. Sedangkan APM adalah tingkat partisipasi penduduk sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dan sesuai dengan kelompok umur jenjang pendidikan tersebut.

Dari tahun 2010 sampai 2014, Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun persentasenya selalu meningkat dari 98,32 persen di tahun 2010 menjadi 99,56 persen di tahun 2014. APS penduduk usia 13-15 tahun walaupun terjadi fluktuasi namun kecenderungan adanya peningkatan yakni dari 77,21 persen di tahun

2010 menjadi 93,24 persen di tahun 2014. Ini membuktikan keberhasilan Pemerintah dengan program pendidikan dasar 9 tahunnya.

Perkembangan APS pada kelompok usia SLTA (16-18 tahun) selama tahun 2010 sampai dengan 2014 juga cukup bervariasi. APS tahun 2010 sebesar 48,02 persen naik menjadi 58,35 pada tahun 2012, dan turun menjadi 54,13 persen di tahun 2013 naik kembali menjadi 59,96 persen pada tahun 2014.

Kelompok usia 19-24 tahun diasumsikan sebagai penduduk yang sedang menempuh jenjang pendidikan di perguruan tinggi. Di tahun 2014 ini kenaikannya cukup tinggi dibandingkan dengan tahun 2013 menjadi sebesar 19,90 persen. Ini membuktikan kesadaran masyarakat Kabupaten Magelang untuk belajar sampai Perguruan Tinggi sangat bagus.

Tabel 5.6
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)
Tingkat SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi Kabupaten Magelang,
2010 - 2014

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)					Angka Partisipasi Murni (APM)				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
SD	112,34	100,56	111,27	111,31	115,15	96,09	88,43	95,89	97,91	98,57
SLTP	75,16	100,15	74,31	82,67	80,37	66,51	71,21	63,64	70,49	74,13
SLTA	51,70	60,22	69,30	53,34	65,21	41,39	47,14	50,47	44,12	52,14
PT	5,41	7,81	10,44	19,25	21,58	3,11	3,99	6,46	15,79	17,05

Sumber data : BPS Kabupaten Magelang

Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Magelang dari tahun 2010-2014 seperti pada tabel 5.6 diatas, terlihat bahwa secara umum APK untuk semua jenjang pendidikan terjadi fluktuasi. Untuk APK tahun 2014 bila dibandingkan dengan APK tahun 2013 mengalami peningkatan, hanya pada jenjang pendidikan SLTP yang terjadi penurunan.

Nilai APK untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) di tahun 2014 ini mencapai 115,15 persen, mengalami kenaikan bila dibanding tahun 2013 yang sebesar 111,31 persen. Bila dicermati bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir nilai APK selalu diatas 100. Hal ini disebabkan oleh banyaknya penduduk yang usianya bukan kelompok 7-12 tahun (kelompok usia SD) yang bersekolah di SD.

Untuk nilai APK pada jenjang pendidikan SLTA dan PT di tahun 2014 ini secara umum mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2013, namun besarnya masih berada di bawah 100 persen. Ini menunjukkan masih kurangnya jumlah penduduk pada kelompok usia SLTA dan PT yang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai. Begitu juga dengan nilai APK untuk jenjang pendidikan SLTP, besarnya masih berada di bawah 100 persen.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih halus lagi dari angka partisipasi sekolah menurut usia sekolah dibuatlah Angka Partisipasi Murni (APM). APM merupakan proporsi penduduk usia sekolah yang sedang sekolah dengan penduduk usia sekolah. APM SD tahun 2014 sebesar 98,57 persen mengalami peningkatan bila dibanding tahun 2013. APM SD sebesar 98,57 persen ini dapat diartikan bahwa ada sekitar 98 sampai 99 dari 100 penduduk usia 7-12 tahun yang benar-benar sedang sekolah di jenjang pendidikan sekolah dasar.

Sejalan dengan APM SD yang mengalami kenaikan pada tahun 2014, APM untuk SLTP, SLTA, dan PT pada tahun 2014 juga mengalami kenaikan. APM SLTP pada tahun 2014 sebesar 74,13 persen naik sekitar 4 persen dari tahun 2013. APM SLTA juga mengalami peningkatan, yaitu dari 44,12 persen di tahun 2013 menjadi 52,14 persen pada tahun 2014. Begitupun dengan APM PT mencapai 17,05 persen pada tahun 2014.

5.2.2. Jenjang Pendidikan

Persaingan hidup di era sekarang ini semakin kompetitif karena bangsa yang menguasai teknologi dan informasi yang akan memenangkan kompetisi tersebut. Sebagai bagian dari Bangsa Indonesia, masyarakat Kabupaten Magelang harus

menyiapkan sumber daya manusia yang siap menguasai teknologi dan komunikasi. Penguasaan teknologi dan komunikasi hanya dapat dicapai oleh masyarakat yang berpendidikan. Maka dari itu kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan dengan cara meningkatkan jenjang pendidikan masyarakatnya.

Ada pergeseran jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk pada level pendidikan bawah yaitu penduduk yang tidak atau belum pernah sekolah dan tidak/belum tamat SD/MI. Pada tahun 2014, persentase penduduk pada level bawah ini mengalami kenaikan, dimana kenaikannya menyebabkan penurunan pada level di atasnya. Di mana untuk tahun 2014 ini proporsinya sebesar 27,67%, sementara pada tahun 2011 dan tahun 2012 proporsinya masing-masing mencapai 24,18% dan 24,52%.

Tabel 5.7
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Magelang, 2010 - 2014

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tdk/Belum Pernah Sekolah	4,88	5,00	4,34	4,19	2,47
Tdk/Belum Tamat SD	18,73	19,18	20,18	23,48	20,69
SD/MI	37,93	36,37	34,45	32,85	33,93
SLTP	20,21	21,67	20,15	18,80	17,96
SMU	7,98	9,31	10,38	11,24	12,21
SMK	7,33	5,43	6,73	5,95	8,39
DI/DII	0,47	0,30	0,56	0,38	0,82
DIII/Sarjana Muda	0,70	1,21	0,99	0,89	0,92
DIV/S1/S2/S3	1,79	1,54	2,23	2,22	2,61
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data : BPS Kabupaten Magelang

Tabel 5.7 menunjukkan bahwa di Kabupaten Magelang penduduk yang menamatkan SD/MI menempati proporsi tertinggi yakni mencapai lebih dari sepertiga jumlah penduduk. Berikutnya adalah persentase dari penduduk yang tidak/belum tamat SD mencapai seperlima dari jumlah penduduk. Kemudian jumlah

penduduk yang telah menamatkan jenjang pendidikan setingkat SLTP pada tahun 2014 hampir 20 persen, yakni sebesar 17,96 persen. Untuk jenjang pendidikan setingkat SMU pada tahun 2014 ada sebesar 12,21 persen penduduk, bila dibandingkan dengan tahun 2013 terjadi peningkatan.

Dan untuk jenjang lainnya seperti SMK dan PT pada besaran kurang dari 10% dari jumlah penduduk di tahun 2014. Yang cukup menggembirakan bila melihat persentase penduduk berumur 10 tahun keatas yang menamatkan pendidikan sampai PT di tahun 2014 terjadi peningkatan.

5.2.3. Sarana Sekolah Dan Tenaga Pengajar

Proses belajar mengajar yang baik harus ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Diharapkan dengan semakin baiknya sarana dan prasarana yang disediakan, produk dari hasil proses belajar akan didapatkan kualitas yang baik dan akan berpengaruh pula terhadap kualitas manusia Kabupaten Magelang pada umumnya.

Berdasarkan data Kabupaten Magelang dalam Angka Tahun 2014, jumlah SD di Kabupaten Magelang pada tahun 2014 sebanyak 605 dengan jumlah desa sebanyak 372. Apabila data jumlah SD dirasiokan dengan jumlah desa akan didapat angka 1,63. Angka ini dapat diartikan bahwa di tiap desa rata-rata terdapat 1 sampai 2 SD. Rasio ini akan semakin besar lagi apabila ditambahkan dengan jumlah lembaga pendidikan yang setara dengan SD yang dalam pengelolaannya dibawah Departemen Agama yaitu MI. Jika ditambahkan dengan MI maka diperoleh rasio sebesar 2,46 yang artinya bahwa di tiap desa rata-rata terdapat 2 sampai 3 SD/MI. Keadaan ini menggambarkan bahwa masyarakat sudah sangat mudah untuk mengakses lembaga pendidikan dasar. Mereka tidak perlu keluar dari desa masing-masing untuk sekedar dapat mengenyam pendidikan dasar.

Keterjangkaun/akses ke sekolah yang lebih tinggi dari Sekolah Dasar (SD) biasanya akan lebih sulit. Berdasarkan data Kabupaten Magelang dalam Angka

Tahun 2014 jumlah SLTP pada tahun 2014 sebanyak 125, diperoleh rasio jumlah sekolah SLTP dengan jumlah desa sebesar 0,34. Artinya rata-rata tiap 3 atau 4 desa baru akan ada satu sekolah SLTP.

Tabel 5.8
Ratio Murid Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan yang Sedang Diduduki di Kabupaten Magelang Tahun Ajaran 2014/2015

Jenjang Pendidikan	Kurikulum Diknas	Kurikulum Depag
(1)	(2)	(3)
SD	153	106
SLTP	291	205
SLTA	329	237

Sumber data : BPS Kabupaten Magelang

Dari tabel ratio murid-sekolah didapat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka ratio murid-sekolah cenderung semakin tinggi. Hal ini dikarenakan sekolah dengan jenjang yang lebih tinggi menerima siswa per-tahunnya cenderung lebih dari satu kelas. Terlihat pula bahwa daya tampung sekolah yang pengelolaannya dibawah pengawasan Diknas lebih tinggi daripada lembaga pendidikan yang pengelolaannya dibawah Depag disemua jenjang pendidikan, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah dan sekolah lanjutan atas.

Dari tabel 5.9, dapat dilihat bahwa rasio murid-guru untuk SD/ sederajat sebesar 13. Artinya tiap 13 siswa SD/ sederajat terdapat satu orang guru. Rasio murid-guru untuk jenjang pendidikan SLTP/ sederajat sama dengan rasio murid guru untuk SD yaitu 13 sedangkan untuk rasio murid guru SLTA/ sederajat cenderung lebih rendah. Dimana rasio murid-guru untuk SLTA/ sederajat sebesar 11. Jika dilihat dari besaran-besaran angka rasio murid-guru disemua jenjang pendidikan, maka pencapaiannya dirasa sudah cukup baik. Lebih baik capaiannya dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 5.9
Ratio Murid Guru Menurut Jenjang Pendidikan yang Sedang Diduduki
di Kabupaten Magelang Tahun Ajaran 2014/2015

Jenjang Pendidikan	Dikelola Diknas	Dikelola Depag	Gabungan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	14	12	14
SLTP	14	10	12
SLTA	12	9	11

Sumber data : BPS Kabupaten Magelang

5.3. Kesehatan

5.3.1. Angka Kesakitan

Angka kesakitan (*morbidity rate*) merupakan indikator yang digunakan mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya, keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

Tabel 5.10
Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan yang lalu
Menurut Jumlah Hari Sakit Di Kabupaten Magelang, 2010 - 2014

Uraian	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Hari Sakit :					
< 4 hari	94,66	95,76	95,78	94,66	95,10
4 – 7 hari	3,41	2,94	3,26	3,48	3,58
8 – 14 hari	0,67	0,33	0,43	0,76	0,46
15 – 21 hari	0,52	0,38	0,21	0,36	0,27
22 – 30 hari	0,74	0,60	0,31	0,74	0,59
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data : Susenas, BPS Kabupaten Magelang

Menurut data Susenas tahun 2014, banyaknya penduduk yang menderita sakit dengan keluhan kesehatan kurang dari 4 hari yaitu sebesar 95,10 persen. Penduduk yang keluhan kesehatannya hilang antara 4 - 7 hari sebesar 3,58 persen dan sebesar 0,46 persen penduduk keluhan kesehatannya hilang antara 8 - 14 hari. Sementara penduduk yang keluhan kesehatannya hilang dalam jangka waktu 15 - 21 hari dan 22 - 30 hari masing-masing sebesar 0,27 persen dan 0,59 persen.

5.3.2. Penolong Persalinan

Tenaga penolong persalinan adalah orang-orang yang memberi pertolongan persalinan selama persalinan berlangsung. Pada dasarnya ada dua jenis tenaga penolong persalinan, yaitu mereka yang mendapat pendidikan formal (tenaga medis), seperti bidan, dokter umum, dokter ahli, dan mereka yang tidak mendapat pendidikan formal melainkan mendapat ketrampilan secara tradisional (tenaga non medis) seperti dukun beranak.

Selama kurun waktu tahun 2010 sampai tahun 2014, persalinan ibu melahirkan di Kabupaten Magelang paling banyak dibantu oleh bidan kemudian persalinan yang dibantu oleh dokter dan yang paling sedikit adalah persalinan ibu yang dibantu oleh dukun. Pada tahun 2014, persalinan ibu yang dibantu oleh dokter naik dibanding keadaan tahun 2013 yaitu dari 13,23 persen menjadi 18,30 persen. Sedangkan persalinan ibu yang dibantu oleh bidan pada tahun 2014 mengalami penurunan walaupun persentasenya masih yang terbesar. Dengan naiknya persalinan ibu yang dibantu oleh dokter maka akan menurunkan persentase persalinan ibu yang dibantu oleh dukun.

Suatu proses kelahiran terkadang tidak hanya dibantu oleh salah satu profesi saja, misalnya dukun saja atau bidan saja. Pada proses kelahiran yang cukup sulit, biasanya penanganan kelahiran akan dilimpahkan kepada profesi tertentu yang dipercayai oleh si ibu yang melahirkan ataupun keluarganya agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Terhadap kemungkinan tersebut, BPS dalam surveinya membagi tahapan penolong kelahiran dengan 2 tahap. Penolong kelahiran pertama yang dimaksudkan adalah penolong kelahiran yang dihubungi oleh keluarga pertama kali sejak tanda-tanda kelahiran janin sudah dirasakan oleh ibu hamil (*suatu tahapan proses kelahiran dimana si ibu dibawa pertama kali untuk pertolongan kelahiran*). Penolong kelahiran terakhir merupakan orang yang dimintai bantuannya oleh keluarga ibu melahirkan untuk menyelesaikan proses kelahiran (*saat dimana si bayi lahir*). Dari data yang dikumpulkan BPS tersebut, ternyata ada perbedaan antara penolong kelahiran tahap pertama dengan penolong kelahiran tahap kedua. Data menunjukkan bahwa proses peralihan penolong kelahiran tahap satu ke tahap dua diambilkan dari tenaga non medis ke tenaga medis atau dari tenaga medis dilimpahkan kepada tenaga medis lainnya yang lebih profesional.



Tabel 5.11
Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Pertama dan Terakhir
Di Kabupaten Magelang, 2010 - 2014

Penolong Kelahiran	Penolong Kelahiran Pertama					Penolong Kelahiran Terakhir				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Dokter	12,73	12,78	10,02	13,23	18,30	17,85	11,46	8,87	15,65	21,21
Bidan	67,73	71,78	77,96	79,35	77,80	71,22	74,39	79,58	73,65	74,18
Tenaga Medis Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,59
Dukun	18,60	14,91	11,50	7,42	3,90	10,59	13,62	11,03	10,05	4,02
Famili dan Lainnya	0,94	0,54	0,52	0,00	0,00	0,34	0,54	0,52	0,00	0,00
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data : Susenas, BPS Kabupaten Magelang

Dari tabel di atas, untuk penolong kelahiran terakhir terlihat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medis terutama dokter masih tinggi. Terbukti dari tabel tersebut bahwa persentase penolong persalinan ibu yang tertinggi di tahun 2014 adalah dokter, yang mengalami kenaikan sebesar 35,53 persen dibandingkan dengan tahun 2013.

5.3.3. Pemberian Asi

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan terbaik untuk bayi, karena di dalam ASI mengandung semua zat makanan yang dibutuhkan bayi. Dengan pemberian ASI dapat meningkatkan imunitas bayi dan meningkatkan tingkat kecerdasannya. Selain itu, terjadinya sentuhan antara ibu dan bayi disaat menyusui akan meningkatkan rasa kasih sayang dan memberikan rasa aman dan nyaman untuk bayi. Ada dua hal pokok yang disarankan dalam pemberian ASI. Pertama: Asi sebaiknya diberikan pada anak hingga anak mencapai usia dua tahun untuk kemudian dihentikan (disapih). Kedua:

selama enam bulan pertama, si bayi sebaiknya diberikan ASI saja tanpa makanan tambahan (ASI eksklusif).

Tabel 5.12
Persentase Pemberian ASI pada Balita Usia 0-4 tahun yang Pernah Disusui Dan Lamanya Disusui (bulan) di Kabupaten Magelang, 2010 - 2014

Uraian	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Balita yang pernah disusui	98,29	95,53	97,18	94,81	95,66
Lamanya disusui					
a. < 24 bulan	66,74	64,52	64,31	63,17	67,97
b. 24 bulan lebih	33,26	35,48	35,69	36,83	32,03
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas, BPS Kabupaten Magelang

Berdasarkan data Susenas seperti pada tabel diatas, dari tahun 2010 - 2014 persentase balita berusia 0 - 4 tahun yang pernah disusui mengalami fluktuasi. Sementara bila dilihat dari pemberian ASI pada balita yang disusui kurang dari 24 bulan mengalami kenaikan. Sedangkan balita yang disusui lebih dari 24 bulan menunjukkan persentase yang menurun.

5.3.4. Fertilitas Dan Partisipasi Keluarga Berencana

Penduduk yang berkualitas merupakan modal awal suatu pembangunan. Namun seperti kita ketahui, masalah kependudukan yang tidak pernah ada habisnya masih menjadi perhatian pemerintah dan bangsa ini. Salah satu masalah yang menjadi perhatian utama pemerintah dalam beberapa tahun belakangan ini adalah laju pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan penduduk perlu dikendalikan karena penambahan penduduk yang tidak terkendali akan menyulitkan pemerintah dalam penyediaan pangan, sandang, perumahan, fasilitas kesehatan, penyediaan lapangan pekerjaan dan bidang-bidang

lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan adanya pertumbuhan penduduk. Salah satu instrumen untuk mengetahui sejak dini kemungkinan adanya pertumbuhan penduduk adalah dengan mengetahui indikator fertilitas. Beberapa indikator fertilitas yang bisa ditampilkan pada analisa kali ini antara lain umur perkawinan pertama, banyaknya anak lahir hidup dari wanita yang pernah kawin dan banyaknya anak yang masih hidup.

Tabel 5.13
Indikator Fertilitas di Kabupaten Magelang, 2010 - 2014

Uraian	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umur Perkawinan Pertama Wanita (persentase) :					
a. < 17 tahun	19,24	14,01	13,81	17,94	16,61
b. 17-18 tahun	25,65	23,57	21,58	23,94	23,93
c. 19-24 tahun	42,10	51,67	49,40	44,94	45,12
d. 25 tahun ke atas	13,02	10,75	15,22	13,18	14,34
Rata-rata Anak Lahir Hidup (ALH) dari Wanita Pernah Kawin (15-49) Tahun	2,18	2,08	2,04	2,05	2,01
Rata-rata Anak Masih Hidup (AMH) dari Wanita Pernah Kawin (15-49) Tahun	2,06	2,02	1,95	1,98	1,95

Sumber : Susenas, BPS Kabupaten Magelang

Umur perkawinan pertama yang terlalu dini menyebabkan percepatan pertumbuhan penduduk. Semakin muda usia pada saat melangsungkan perkawinan pertama kali, maka semakin lama panjang waktu yang dimungkinkan untuk hamil/melahirkan. Selain itu, wanita yang kawin pada usia yang sangat muda mempunyai resiko yang cukup besar pada saat mengandung dan melahirkan serta berdampak pada kesehatan ibu dan anak.

Data yang diperoleh dari hasil Susenas 2014 menyebutkan bahwa perkawinan pertama pada wanita usia kurang dari 17 tahun sebesar 16,61 persen dan pada

kelompok usia 17-18 tahun sebesar 23,93 persen, terjadi penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2013. Angka ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dapat menekan angka perkawinan pertama pada usia dibawah 18 tahun. Sedangkan perkawinan pertama wanita pada kelompok usia 19-24 tahun dan kelompok usia 25 tahun keatas masing-masing sebesar 45,12 persen dan 14,34 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, maka perkawinan pertama wanita pada kelompok usia tersebut mengalami kenaikan.

Diperlukan kecermatan untuk mengamati laju pertumbuhan banyaknya anak lahir hidup. Sebab banyaknya anak lahir hidup dari wanita pernah kawin pada wanita yang masih produktif (usia 15-49 tahun) dari tahun 2010 sampai tahun 2012 cenderung menurun tetapi di tahun 2013 angkanya mulai beranjak naik dan kembali menurun pada tahun 2014. Tetapi bila angkanya dibulatkan menjadi 0 digit dibelakang koma, rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup masih disekitar 2 anak per wanita produktif. Angka tersebut masih dalam batas program pemerintah yaitu cukup 2 anak dalam satu pasangan hidup.

Partisipasi penduduk terhadap program Keluarga Berencana (KB) yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka program pengendalian jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap angka kelahiran. Partisipasi KB atau penduduk yang pernah KB dari wanita pernah kawin usia 15-49 tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2010 sebanyak 75,78 persen wanita usia tersebut pernah ikut proram KB. Tahun 2011 partisipasinya naik menjadi 84,28 persen. Kemudian pada tahun 2012 angka partisipasinya turun menjadi 83,81 persen, di tahun 2013 naik kembali menjadi 84,82 persen dan untuk tahun 2014 turun menjadi 80,98 persen.

Perkembangan penduduk usia 15-49 tahun yang sedang ber-KB dari tahun 2010-2014 juga mengalami fluktuasi. Untuk tahun 2014 ini persentase penduduk wanita usia 15-49 tahun dengan partisipasi KB-nya sebesar 80,98 persen terhadap total

penduduk wanita usia 15-49 tahun, 80,86 persen sedang memakai KB dan 19,14 persen sisanya tidak memakai KB lagi.

Tabel 5.14
Indikator Keluarga Berencana (KB) Wanita Berumur 15-49 Tahun,
Pernah Kawin dan Pernah/Tidaknya Menggunakan Alat/Cara KB
di Kabupaten Magelang, 2010 - 2014

Uraian	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Partisipasi KB (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
a. Pernah memakai	75,78	84,28	83,81	84,82	80,98
b. Tdk pernah memakai	24,22	15,72	16,19	15,18	19,02
Yang pernah memakai (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
a. Sedang memakai KB	78,91	78,43	80,23	77,54	80,86
b. Tdk memakai KB lagi	21,09	21,57	19,77	22,46	19,14
Alat Kontrasepsi (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
a. MOW/Tubektomi	7,53	2,83	4,19	4,26	5,48
b. MOP/Vasektomi	1,45	0,46	0,82	0,92	0,39
c. AKDR/IUD	15,41	13,68	16,12	17,49	15,89
d. Suntikan KB	53,48	57,12	48,94	47,70	50,64
e. Susuk KB	8,22	9,15	7,98	11,77	8,13
f. Pil KB	13,27	14,26	16,55	16,02	15,38
g. Kondom	0,23	1,77	0,77	0,66	2,46
h. Intravag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i. Kondom Wanita	0,00	0,23	0,00	0,46	0,00
j. Tradisional	0,41	0,48	4,62	0,72	1,63

Sumber : BPS Kabupaten Magelang

Jika dilihat dari pemakaian alat kontrasepsi, jenis alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah suntikan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penggunaan alat KB suntik mencapai persentase yang cukup tinggi yaitu berada pada kisaran 50 persen. Pada tahun 2014, dari sebanyak 80,86 persen wanita subur yang sedang menggunakan alat kontrasepsi, 50,64 persen adalah pengguna alat kontrasepsi suntikan. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang hanya sebesar 47,70 persen.

Alat kontrasepsi lain yang cukup diminati adalah AKDR/IUD dan Pil KB, masing-masing digunakan oleh pengguna alat KB sebesar 15,89 persen dan 15,38 persen. Kemudian pengguna susuk KB sebesar 8,13 persen. Pengguna susuk ini bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan hampir 45 persen, di mana tahun 2013 mencapai 11,77 persen. Untuk pengguna alat kontrasepsi lainnya dengan persentase kecil sekali dan berada dibawah 5 persen seperti MOP/vasektomi (0,32 persen), kondom (2,46 persen), dan KB tradisional (1,63 persen). Untuk tahun 2014 ini, pengguna KB dengan cara tradisional bila dibandingkan dengan tahun 2013 besarnya meningkat yaitu dari 0,72 persen menjadi 1,63 persen di tahun 2014. Ini dimungkinkan karena pengguna KB cara tradisional ini lebih murah dari segi biaya.

Dari semua alat kontrasepsi yang ditawarkan kepada masyarakat, ternyata pengguna terbesar adalah wanita. Hal ini bisa dilihat dari jenis-jenis alat kontrasepsi yang digunakan oleh mayoritas penduduk. Pada tahun 2014, kondom dan MOP/vasektomi yang penggunaannya adalah kaum pria persentasenya jika dijumlahkan hanya 2,85 persen. Hal ini berarti bahwa 97,15 persen sisa penggunaannya adalah kaum wanita.

5.4. Perumahan

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga adalah fasilitas perumahan yang dimiliki oleh penduduknya. Arti fisik perumahan dalam konteks yang diperluas disebut pemukiman. Pemukiman yaitu tempat tinggal anggota masyarakat dan individu-individu yang biasanya hidup dalam ikatan perkawinan atau keluarga beserta berbagai fasilitas pendukungnya. Perumahan menjadi tempat tumbuh, hidup, berinteraksi, perlindungan dari gangguan dan fungsi lainnya bagi penghuninya. Dengan demikian semakin tinggi status sosial ekonomi, keadaan rumah semakin lengkap dan bermutu baik. Lengkap dalam arti fasilitas yang dimiliki rumah tersebut seperti listrik, air, jaringan drainase, telepon, serta sistem pembuangan kotoran semuanya tersedia.

Secara umum, kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan, yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan dari penghuninya. Oleh karena itu aspek kesehatan dan kenyamanan bahkan keindahan bagi sebagian masyarakat tertentu akan sangat menentukan pemilihan rumah tinggal mereka dan hal tersebut berkaitan dengan kesejahteraan penghuninya. Selain kualitas rumah tinggal, tingkat kesejahteraan dapat juga digambarkan dengan fasilitas rumah tinggal yang digunakan sehari-hari. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi para penghuninya.

Indikator ini menunjukkan kualitas dan kuantitas tempat tinggal yang dikuasai baik milik sendiri maupun bukan. Fisik bangunan yang kuat dan terbuat dari bahan yang tidak membahayakan, menjamin keamanan penghuni tidak saja dari ancaman kriminal tetapi juga dari kerentanan bangunan itu sendiri dan kemungkinan terserang penyakit. Fisik bangunan yang kuat ditentukan oleh pemilihan bahan komponen bangunan yaitu lantai, dinding, dan atap. Sementara kenyamanan dan kesehatan penghuni selain mengharuskan pemilihan bahan bangunan yang baik juga luas lantai yang memadai.

Menurut data Susenas tahun 2014 seperti tersebut pada tabel 5.15, persentase rumah tangga yang menempati luas bangunan tempat tinggal dengan luas 50-99 m² dari tahun 2010-2014 hampir mencapai 60 persen bahkan di tahun 2011 mencapai 64,83 persen, dan untuk tahun 2014 ini sebesar 59,41 persen. Rumah tangga yang menempati bangunan dengan luas kurang dari 50 m² dan dengan luas 100-149 m² masing-masing sebesar 12,04 persen dan 21,55 persen. Dan rumah tangga dengan luas lantai lebih dari 150 m² besarnya kurang dari 10 persen, dan tahun ini walaupun meningkat dibanding tahun 2013 namun besarnya hanya 7 persen.

Tabel 5.15
Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal
di Kabupaten Magelang, 2010 - 2014

Uraian	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Luas Lantai (m²) :					
a. < 50	16,91	15,83	16,53	18,65	12,04
b. 50 - 99	58,51	64,83	58,47	56,90	59,41
c. 100 - 149	18,07	14,10	19,39	17,76	21,55
d. > 150	6,52	5,23	5,61	6,69	7,00
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Magelang

Jenis lantai dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kualitas perumahan. Semakin baik kualitas lantai perumahan dapat diasumsikan semakin membaik tingkat kesejahteraan penduduknya. Selain itu, jenis lantai juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Semakin banyak rumah tangga yang mendiami rumah dengan lantai tanah akan berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Hal ini dikarenakan lantai tanah dapat menjadi media yang subur bagi timbulnya kuman penyakit dan media penularan bagi jenis penyakit tertentu, seperti penyakit diare, cacangan dan penyakit kulit.

Tabel 5.16
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum
di Kabupaten Magelang, 2010 - 2014

Uraian	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumber Air Minum					
a. Air dalam kemasan	0,36	0,72	0,51	2,48	2,26
b. Ledeng	13,30	15,77	18,66	14,16	15,42
c. Pompa	6,94	7,06	7,63	7,83	7,68
d. Sumur	41,03	38,01	33,28	41,22	29,08
e. Mata Air	38,37	38,44	39,88	34,31	45,56
f. Lainnya	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Magelang

Persentase rumah tangga menurut sumber air minum seperti pada tabel 5.16 diatas menyebutkan bahwa rumah tangga yang menggunakan air sebagai sumber air minum terbanyak adalah berasal dari mata air yakni mencapai 45,56 persen. Angka ini naik sekitar 11 persen dibanding pada tahun 2013 yaitu sebesar 34,31 persen. Penggunaan air minum setelah mata air, sumur menjadi sumber air minum yang banyak dipakai oleh rumah tangga, untuk tahun 2014 ini sebanyak 29,08 persen. Apabila kedua persentase tersebut dijumlahkan maka sudah didapatkan angka 74,64 persen. Artinya mata air dan sumur sudah dipakai oleh sekitar $\frac{3}{4}$ jumlah penduduk Kabupaten Magelang sebagai sumber air minum. Setelah mata air dan sumur, ledeng sebagai sumber air minum juga banyak digunakan yaitu sebesar 15,42 persen. Dan penggunaan air sebagai sumber air minum seperti pompa dan air dalam kemasan persentasenya tidak lebih dari 10 persen.

Tabel 5.17
Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Magelang, 2010 - 2014

Uraian	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fasilitas Tempat Buang Air Besar					
a. Sendiri	60,82	62,07	67,25	70,06	73,70
b. Bersama	7,54	10,09	10,43	5,86	6,34
c. Umum	8,94	5,93	6,10	7,27	6,72
d. Tidak Ada	22,70	21,91	16,21	16,81	13,24
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Magelang

Semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat Kabupaten Magelang tentang pentingnya kondisi lingkungan yang sehat. Salah satu hal yang mendukung kondisi tersebut yaitu dengan semakin meningkatnya persentase rumah tangga yang mempunyai tempat buang air besar sendiri dan semakin menurunnya persentase rumah tangga yang memanfaatkan tempat BAB umum. Persentase rumah tangga

pengguna tempat BAB sendiri pada tahun 2014 sebesar 73,70 persen naik sekitar 3 persen dibanding keadaan tahun 2013 yaitu sebesar 70,06 persen.

<https://magelangkab.bps.go.id>



Bab VI Kesimpulan dan Saran

1. IPM adalah variabel tak bebas yang bersifat *state*, yaitu sebuah variabel yang perubahannya berlangsung sangat lambat dan akan meningkat/menurun sedikit demi sedikit sebagai respon terhadap perubahan berbagai kondisi fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan. Tidaklah mungkin mengubah tingkat IPM secara bermakna melalui program/proyek yang hanya bersifat temporer. Perencanaan pembangunan manusia yang dibuat seyogyanya mengacu pada kebijakan jangka panjang secara sistematis.
2. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Magelang Tahun 2014 sebesar 66,35 persen, walaupun lebih rendah dibanding IPM Jawa Tengah (68,78 persen) namun menempati peringkat ke-3 se-karesidenan Kedu dan se-Jawa Tengah pada peringkat ke-25. Peringkat yang cukup membanggakan tapi diusahakan agar bisa ditingkatkan.
3. Angka Harapan Hidup Masyarakat Kabupaten Magelang tahun 2014 sebesar 73,25 tahun. Lebih rendah dibanding angka harapan hidup Jawa Tengah (73,88 tahun) namun bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain se-Karesidenan Kedu maka menempati peringkat yang ke-4.
4. Harapan Lama Sekolah masyarakat Kabupaten Magelang tahun 2014 sebesar 12,00 tahun, lebih rendah bila dibandingkan dengan angka Jawa Tengah. Dimana angka harapan lama sekolah masyarakat Provinsi Jawa Tengah sebesar 12,17 tahun dan pada tingkat Karesidenan Kedu terbaik keempat.
5. Rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Magelang tahun 2014 sebesar 7,02 tahun. Dengan kata lain rata-rata masyarakat Kabupaten Magelang telah menempuh pendidikan selama 7,02 tahun atau setara menduduki bangku kelas 1 (satu) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Angka ini lebih tinggi bila dibandingkan angka Jawa Tengah (rata-rata lama sekolah untuk Jawa Tengah sebesar 6,93 tahun).

<https://magelangkab.bps.go.id>



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

Jl. Soekarno - Hatta No. 59, Telp. (0293) 788819 Fax. (0293) 788122